



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

DINAS KESEHATAN



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIKKA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan petunjukNya sehingga proses penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Dokumen ini berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Sikka untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang dijabarkan dalam bentuk Visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dan target pencapaiannya, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar perencanaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mengambil bagian dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Dengan sebuah kesadaran bahwa ada bagian-bagian yang belum sempurna dari dokumen ini maka pikiran-pikiran konstruktif tentu sangat diharapkan untuk proses penyempurnaan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Semoga dengan adanya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, sinergitas para pelaku pembangunan dibidang kesehatan semakin baik dan terarah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sikka.

Maumere, September 2025

PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka,


Petrus Herlemus, S.Si., Apt., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19711214 200112 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIAS DINAS KESEHATAN8

 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan 8

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan..... 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 54

 3.1 Tujuan 54

 3.2 Sasaran..... 55

 3.3 Strategi 64

 3.4 Arah Kebijakan 71

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 73

 4.1 Uraian Program 73

 4.2 Uraian Kegiatan 76

 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu
 Indikatif 101

 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
 Pembangunan Daerah..... 147

 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
 Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja
 Utama Perangkat Daerah 150

BAB V Penutup 153

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Distribusi SDM Kesehatan Berdasarkan Status Kependidikan Tahun 2022	17
Tabel 2.2 Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Masing-masing Unit Kerja Tahun 2022	18
Tabel 2.3 Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jabatan dan Golongan Perunit Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2022	19
Tabel 2.4 Ratio Sumber Daya Kesehatan per Jumlah Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2022	20
Tabel 2.5 Jumlah dan Status Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2022	21
Tabel 2.6 Sarana Puskesmas, Persebaran Pustu, Rumah Dinas dan Kondisinya Tahun 2022	22
Tabel 2.7 Kondisi Prasarana Puskesmas di Kabupaten Sikka Tahun 2022	25
Tabel 2.8 Persentase kelengkapan Peralatan Kesehatan per Puskesmas di Kabupaten Sikka Tahun 2022	27
Tabel 2.9 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Tahun 2022	29
Tabel 2.10 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kepemilikan di Kabupaten Sikka Tahun 2022	32
Tabel 2.11 Jenis dan Jumlah UKBM per Puskesmas di Kabupaten Sikka Tahun 2022	34
Tabel 2.12 Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	50
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d Tahun 2022	56
Tabel 3.1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	63

Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	64
Tabel 3.3	Isu Strategis dan Program Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	66
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	67
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	72
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2026-2024	80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	107

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Sikka	16
Grafik 2.1	Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	36
Grafik 2.2	Prevalensi Stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	37
Grafik 2.3	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	37
Grafik 2.4	Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2023	38
Grafik 2.5	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d tahun 2022	39
Grafik 2.6	Prevalensi Wasting di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	40
Grafik 2.7	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Sikka Tahun 2020 s/d 2022	41
Grafik 2.8	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Sikka Tahun 2020 s/d 2022	42
Grafik 2.9	Preavalensi HIV/AIDS di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2020.....	42
Grafik 2.10	Trend Annual Paracite Incidence Malaria di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	43
Grafik 2.11	Succes Rate TB BTA+ di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	44
Grafik 2.12	Incidence Rate Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	45
Grafik 2.13	Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	46

Grafik 2.14	Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan STBM di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022	47
Grafik 2.15	Perkembangan Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2018 s/d 2022.....	48
Grafik 2.16	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2018 s/d 2022	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sikka yang terarah dan terukur, diperlukan perencanaan yang berkualitas dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ayat (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sikka lima tahun ke depan. Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Kesehatan menjadi sangat penting untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib dibidang kesehatan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Fungsi dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 dimulai dari proses persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, verifikasi rancangan awal, penyusunan rancangan akhir, review APIP terhadap rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan oleh Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sikka. Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2025. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025–2029 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang lebih terperinci yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan. Renja Dinas Kesehatan selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan dan

selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 I-3 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Sikka tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sikka Nomor 149);
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Sikka serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran, termasuk juga rencana- rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun mendatang. Dokumen operasional dalam perencanaan Dinas Kesehatan periode Tahun 2025-2029 mengacu pada Renstra ini sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergisitas perencanaan Dinas Kesehatan baik secara internal maupun ekseternal.

1.3.2 Tujuan

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka

menengah daerah.

- b. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) setiap tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sistematis dan terukur.
- c. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
- d. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan menyusun indikator kinerja utama yang terukur dan realistis.
- f. Sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat tentang: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, memuat tentang: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan; Sumber Daya Dinas Kesehatan; Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan; Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan, Mitra Dinas Kesehatan; Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Kesehatan, Mengidentifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan serta Menyusun dan Merumuskan Isu Strategis Dinas Kesehatan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang: Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat tentang Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam 5 tahun mendatang

guna mendukung RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2029.

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIAS DINAS KESEHATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka diatur melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
4. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara struktural, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka merupakan perangkat daerah dengan Tipe A yang mempunyai alat kelengkapan struktur

organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang sesuai dengan struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dijabarkan sebagai berikut:

A. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan

dokumentasi;

- e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- g. Koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

- j. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- j. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

- pengecanaan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer tradisional;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- f. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- j. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- m. Rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- e. Rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
- f. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan Daerah;
- g. Rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- h. Rekomendasi penerbitan izin usaha micro obat tradisional;
- i. Rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- j. Rekomendasi penerbitan izin produk makanan minuman industri rumah tangga; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Selain alat kelengkapan struktural di atas, berdasarkan Peraturan

Bupati Sikka Nomor 22 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka juga membawahi 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan dan 25 UPT Puskesmas.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan dan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
3. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium kesehatan;
4. Pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian;
5. Pelaksanaan inventarisasi atau pendataan sarana air bersih, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Fungsi penyelenggaraan UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

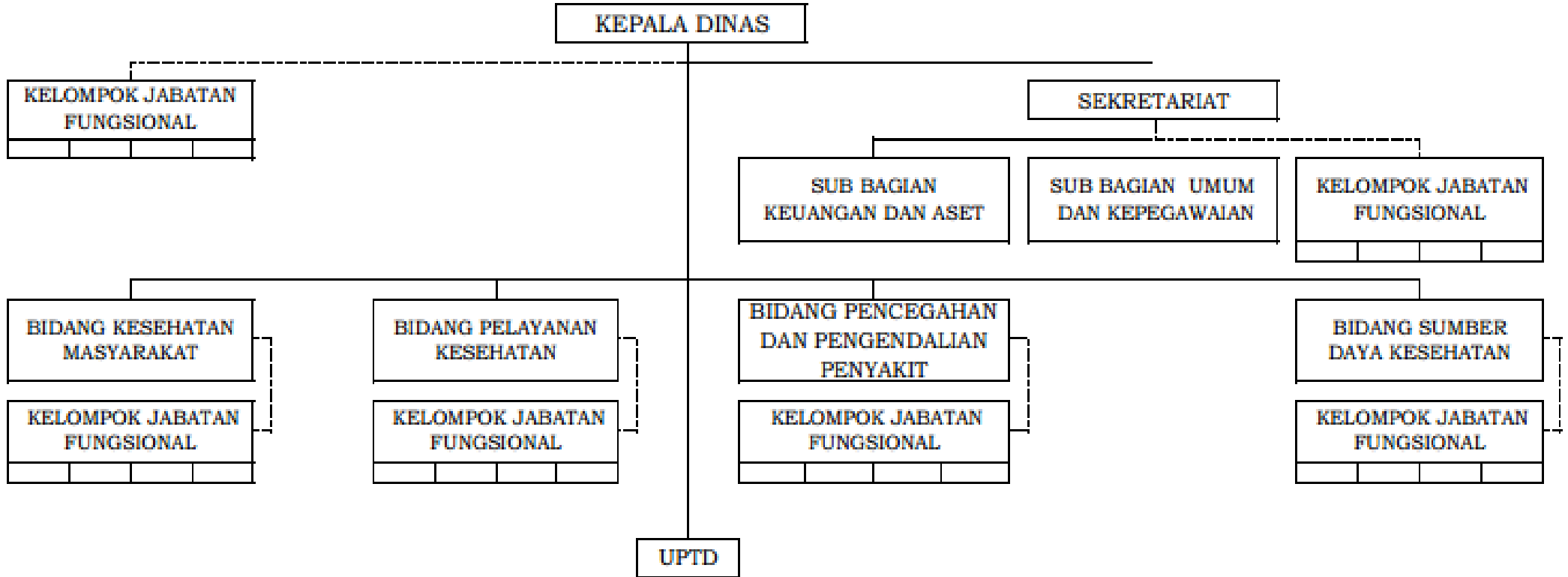
1. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka terdiri dari:

1. UPT Puskesmas Boganatar
2. UPT Puskesmas Watubaing

3. UPT Puskesmas Tanarawa
4. UPT Puskesmas Waigete
5. UPT Puskesmas Mapitara
6. UPT Puskesmas Habibola
7. UPT Puskesmas Bola
8. UPT Puskesmas Hewokloang
9. UPT Puskesmas Waipare
10. UPT Puskesmas Beru
11. UPT Puskesmas Kopeta
12. UPT Puskesmas Nelle
13. UPT Puskesmas Koting
14. UPT Puskesmas Nanga
15. UPT Puskesmas Nita
16. UPT Puskesmas Lekebai
17. UPT Puskesmas Paga
18. UPT Puskesmas Wolofeo
19. UPT Puskesmas Magepanda
20. UPT Puskesmas Wolomarang
21. UPT Puskesmas Palue
22. UPT Puskesmas Tuanggeo
23. UPT Puskesmas Teluk Maumere
24. UPT Puskesmas Feondari
25. UPT Puskesmas Kewapante

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka



Sumber: Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

a) Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di lingkungan Dinas Kesehatan pada bulan Mei 2025 sebanyak 1.455 orang yang terdiri dari tenaga ASN (PNS dan PPPK) serta dan Non ASN (pegawai tidak tetap, tenaga kontrak daerah dan tenaga kerja sukarela) yang tersebar di Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas dan UPT Labkes. Adapun distribusi SDMK berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Distribusi SDMK Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Tahun 2025

No .	Status Kepegawaian	Unit Kerja									Jumlah		
		Dinas Kesehatan			UPT Puskesmas			UPT Labkes					
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
A.	ASN:	31	67	98	150	960	1,110	5	7	12	186	1,034	1,220
1.	PNS	26	56	82	108	758	866	3	7	10	137	821	958
2.	PPPK	5	11	16	42	202	244	2	0	2	49	213	262
B.	NON ASN	15	8	23	54	154	208	3	1	4	72	163	235
1.	PTT	1		1	4	14	18	0	0	0	5	14	19
2.	Tenaga Kontrak (Honor Daerah)	4	4	8	13	17	30	0	0	0	17	21	38
3.	Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Insenda	10	4	14	37	123	160	3	1	4	50	128	178
Jumlah		46	75	121	204	1,114	1,318	8	8	16	258	1,197	1,455

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.1 diatas menggambarkan sebagian besar SDMK di lingkungan Dinas Kesehatan berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 1.197 orang (82%) sedangkan laki-laki berjumlah 258 orang (18%). Dilihat dari status kepegawaian didominasi oleh ASN yakni sebanyak 1.220 orang (84%) sedangkan sebanyak 235 orang (16%) orang berstatus Non ASN.

2. Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi SDMK berdasarkan tingkat pendidikan di masing-masing unit kerja dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Distribusi SDMKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Unit Kerja			Jumlah
		Dinas Kesehatan	UPT Puskesmas	UPT Labkes	
A.	Tenaga Kesehatan	77	1.239	15	1.331
1	S2 Hukum	1	0	0	1
2	S2 Kesehatan Masyarakat	7	1	0	8
3	S2 Keperawatan	4	1	0	5
4	S-2 Kebidanan	2	0	0	2
5	S-2 Kedokteran tropis	1	0	1	2
6	Dokter Umum	1	19	0	20
7	Dokter Gigi	0	7	0	7
8	S1 Kesehatan Masyarakat	12	56	0	68
9	S1 Keperawatan	7	104	0	111
10	S1 Mnajemen Rumah Sakit	0	0	0	0
11	S1 Farmasi /Apt	5	14	2	21
12	S1 Gizi	1	13	0	14
13	S-1 Sains Biologi	0	0	0	0
14	S-1 Kimia	0	0	1	1
15	S-1 Teknik Kimia	1	0	1	2
16	D-IV Kesling	2	0	1	3
17	S-1 Biologi	2	0	0	2
18	S-1 Kesehatan Lingkungan	1	0	1	2
19	D4 Kebidanan	3	40	0	43
20	D4 Kesehatan Masyarakat	0	3	0	3
21	D3 Keperawatan	4	255	0	259
22	D3 Kebidanan	11	389	0	400
23	D3 Kesehatan Lingkungan	1	120	2	123
24	D3 Gizi	1	36	0	37
25	D3 Kefarmasian	7	36	1	44
26	D3 Rekam Medik	0	38	0	38
27	D3 Analis Kesehatan	1	51	5	57
28	D3 Elektromedik	1	7	0	8
29	D3 Perawat Gigi	1	21	0	22
30	D3 Fisioterapi	0	13	0	13
31	D3 Manajemen Adminitrasi Rs	0	2	0	2
32	D1 Kebidanan	0	8	0	8
33	SPK	0	0	0	0
34	SPRG	0	3	0	3
35	SPPH	0	2	0	2
B.	TENAGA NON KESEHATAN	44	79	1	124
1	S1/D4	20	19	0	39
2	D3	4	3	0	7
3	SLTA/Sederajat	16	42	0	58
4	SLTP/ Sederajat	4	7	1	12
5	SD	0	8	0	8
Jumlah		121	1.318	16	1.455

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.2 diatas diketahui bahwa dari 1.455 sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, 91% merupakan tenaga kesehatan dan 9% merupakan tenaga non kesehatan. Sebagian besar tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan telah berpendidikan minimal Diploma 3 dengan jumlah paling banyak jenjang pendidikannya adalah Diploma 3 Kebidanan yaitu sebanyak 30% dari total tenaga kesehatan. Sebanyak 18 orang tenaga kesehatan memiliki tingkat pendidikan Strata 2 baik dibidang kesehatan (17 orang) maupun non kesehatan (1 orang). Tenaga kesehatan yang belum berpendidikan minimal Diploma 3 sebanyak 13 orang yang saat ini sudah tidak mendapat izin praktek untuk melayani pasien.

3. Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jabatan dan Golongan per Unit Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Distribusi SDMK berdasarkan jabatan dan golongan per unit kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jabatan dan Golongan
Perunit Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2025

No.	Uraian Jabatan	Unit Kerja			Jumlah
		Dinas Kesehatan	UPT Puskesmas	UPT Labkes	
1.	Struktural eselon II	1	0	0	1
2.	Struktural eselon III	5	0	0	5
3.	Struktural eselon IV	1	0	2	3
4.	Jabatan fungsional tertentu	45	1.084	9	1.138
5.	Pelaksana	69	234	5	308
Jumlah		121	1.318	16	1.455

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dari tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar SDMK di unit kerja Dinas Kesehatan merupakan tenaga fungsional umum sedangkan di UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Puskesmas didominasi oleh tenaga fungsional tertentu. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan perlu didorong untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan analisa beban kerja dan rencana kebutuhan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan.

4. Ratio Sumber Daya Kesehatan per Jumlah Penduduk

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 mengatur tentang rencana pengembangan tenaga kesehatan yang menyeluruh untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut telah menetapkan target rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat tercapai ditahun 2025. Sampai dengan bulan Mei 2025, rasio ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka sesuai target nasional dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Ratio Sumber Daya Kesehatan per Jumlah Penduduk di Kabupaten Sikka
Tahun 2025

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Satuan	Standar Nasional	Jumlah Nakes yang tersedia	Rasio Kab. Sikka Tahun 2024	Gap
1.	Dokter Spesialis	per 100.000 penduduk	12	26	7.5	(4)
2.	Dokter Umum	per 100.000 penduduk	50	13	13.0	(37)
3.	Dokter Gigi	per 100.000 penduduk	14	5	1.4	(13)
4.	Perawat	per 100.000 penduduk	200	307	88.6	(111)
5.	Bidan	per 100.000 penduduk	130	224	64.6	(65)
6.	Perawat gigi	per 100.000 penduduk	21	28	8.1	(13)
7.	Apoteker	per 100.000 penduduk	15	43	12.4	(3)
8.	Tenaga Teknis Kefarmasian	per 100.000 penduduk	30	10	2.9	(27)
9.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	per 100.000 penduduk	18	39	11.3	(7)
10.	Sanitarian	per 100.000 penduduk	20	38	11.0	(9)
11.	Tenaga Gizi	per 100.000 penduduk	18	45	13.0	(5)
12.	Keterapian Fisik	per 100.000 penduduk	6	10	2.9	(3)
13.	Keteknisian Medis	per 100.000 penduduk	18	28	8.1	(10)

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2025

Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa 13 jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka belum sesuai dengan standar rasio tenaga kesehatan secara nasional. Kesenjangan rasio tenaga kesehatan antara standar nasional dengan kondisi eksisting di Kabupaten Sikka tertinggi pada tenaga perawat dimana

standar nasional adalah 200 orang per 100.000 penduduk sedangkan rasio di Kabupaten Sikka saat ini adalah 88 orang per 100.000 penduduk. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan maka Dinas Kesehatan perlu membuat perencanaan dan pemenuhan kebutuhan jenis tenaga kesehatan agar sesuai dengan target rasio tenaga kesehatan secara nasional.

b) Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

1. Unit Kerja Dinas Kesehatan

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2024

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah dan kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Bangunan Kantor Dinas Kesehatan			2		2
2	Bangunan PSC 119		1			1
3	Bangunan Gudang Farmasi Kabupaten	1				1
4	Kendaraan roda empat	7	2	1	15	25
5	Kendaraan sepeda motor	17			29	46
6	Laptop	20			2	22
7	Komputer	3			1	4
8	Printer	5		2		7
9	LCD	2				2
10	Genzet				25	25
11	Kursi kerja	153			6	159
12	Meja kerja	72		1		73
13	AC dinding	5		1		6

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2024

Bangunan Kantor Dinas Kesehatan saat ini dalam kondisi rusak akan tetapi tetap digunanakan untuk memberikan pelayanan. Dinas Kesehatan membutuhkan gedung yang lebih representatif berikut sarana dan parasarana pendukungnya agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dalam mendukung tujuan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sikka.

2. UPT Puskesmas dan Jaringannya

Puskesmas di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2024 berjumlah

25 Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Rasio Puskesmas di Kabupaten Sikka terhadap penduduk pada tahun 2024 adalah sebesar 1:13.865. Angka ini sudah memenuhi rasio yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yakni 1:30.00 penduduk. Rasio Puskesmas terhadap kecamatan adalah sebesar 1:1,2. Angka ini masih dibawah angka ideal menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut menargetkan rasio Puskesmas terhadap kecamatan adalah sebesar 1:2.

Pada tahun 2024, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 95 Tahun 2024 tentang Peningkatan Status Pelayanan Puskesmas Pembantu Plus Wualadu menjadi Puskesmas Wualadu Kecamatan Doreng dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 96 Tahun 2024 tentang Peningkatan Status Pelayanan Puskesmas Pembantu Plus Kojagate menjadi Puskesmas Kojagete Kecamatan Alok Timur. Dengan demikian jumlah Puskesmas di kabupaten Sikka bertambah menjadi 27 Puskesmas.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 57/HK/2025 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Kemampuan Pelayanan di Kabupaten Sikka serta hasil penilaian survey akreditasi Puskesmas, jumlah dan status Puskesmas per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah dan Status Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka
Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Status		
			Kemampuan Pelayanan	Karakteristik Wilayah	Akreditasi
1.	Paga	Paga	Rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Madya
2.	Tanawawo	Wolofeo	Rawat inap	Terpencil	Utama
3.	Mego	Lekebai	Non rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
		Feondari	Rawat Inap	Terpencil	Utama
4.	Lela	Nanga	Non rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
5.	Nita	Nita	Rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
6.	Koting	Koting	Non rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
7.	Nelle	Nelle	Non rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Paripurna
8.	Alok	Kopeta	Non rawat inap	Tidak terpencil perkotaan	Paripurna
		Teluk	Rawat inap	Sangat terpencil	Utama
9.	Alok Barat	Wolomarang	Non rawat inap	Tidak terpencil perkotaan	Utama
10.	Alok Timur	Beru	Non Rawat inap	Tidak terpencil perkotaan	Paripurna
		Kojagete	Rawat inap	Sangat terpencil	Belum

No	Kecamatan	Puskesmas	Kemampuan Pelayanan	Status	
				Karakteristik Wilayah	Akreditasi
11.	Magepanda	Magepanda	Rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
12.	Palue	Palue	Rawat inap	Sangat terpencil	Madya
		Tuanggeo	Non rawat inap	Sangat terpencil	Madya
13.	Kangae	Waipare	Non rawat inap	Tidak terpencil perkotaan	Utama
14.	Kewapante	Kewapante	Non rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
15.	Hewokloang	Hewokloang	Non rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
16.	Bola	Bola	Rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Paripurna
17.	Doreng	Habibola	Non rawat inap	Terpencil	Madya
		Wualadu	Non rawat inap	Terpencil	Belum
18.	Mapitara	Mapitara	Rawat inap	Terpencil	Madya
19.	Waigete	Waigete	Rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
20.	Talibura	Watubaing	Rawat inap	Tidak terpencil pedesaan	Utama
		Boganatar	Rawat inap	Terpencil	Paripurna
21.	Waiblama	Tanarawa	Rawat inap	Terpencil	Utama

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa dari 27 Puskesmas di Kabupaten Sikka sebanyak 14 Puskesmas (52%) berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap dan 13 (48%) Puskesmas berstatus Puskesmas Non Rawat Inap. Dari karakteristik wilayah terdapat 4 Puskesmas (15%) (dengan kategori tidak terpencil perkotaan, 12 Puskesmas (44%) dengan kategori tidak terpencil pedesaan, 7 Puskesmas (26%) dengan kategori terpencil dan 4 Puskesmas (15%) dengan kategori sangat terpencil. Survey akreditasi Puskesmas sampai dengan tahun 2024 menunjukkan hasil sebanyak 5 Puskesmas (19%) berstatus akreditasi Paripurna, 15 Puskesmas (56%) akreditasi Utama, 5 Puskesmas (19%) akreditasi Madya serta 2 Puskesmas (7%) yang baru ditingkatkan pelayanannnya sebagai Puskesmas belum dilakukan akreditasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka untuk meningkatkan tatakelola manajemen, saat ini Puskesmas di Kabupaten Sikka didorong dan disiapkan untuk menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan menjadi BLUD sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

Adapun kondisi sarana Puskesmas, persebaran Pustu dan kondisinya

dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Sarana Puskesmas, Persebaran Pustu, Rumah Dinas dan Kondisinya
Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Puskesmas	Jumlah dan kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Puskesmas	11	4	3	9	27
2	Tempat Tidur perawatan umum	138	6	17	16	177
3	Tempat tidur perawatan bersalin	67	1	4	13	85
4	Pustu	30	2	7	29	68
5	Rumah Dinas	50	11	7	37	105

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Tabel 2.7 diatas menggambarkan dari 27 bangunan Puskesmas yang ada di Kabupaten Sikka, terdapat 11 Puskesmas dengan kondisi bangunan yang masih baik, 4 Puskesmas dengan kondisi bangunan rusak ringan, 3 Puskesmas dengan kondisi bangunan rusak sedang dan 9 Puskesmas dengan kondisi rusak berat. Sampai dengan tahun 2024, baru terdapat 4 Puskesmas yang dibangun dengan desain mengikuti prototype bangunan Puskesmas yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Tempat tidur perawatan di Puskesmas sampai dengan tahun 2024 berjumlah 262 buah terdiri atas tempat tidur perawatan umum sebanyak 177 buah dan tempat tidur perawatan persalinan sebanyak 85 buah dengan rasio tempat tidur terhadap penduduk adalah 1:1.323 penduduk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar rasio tempat tidur terhadap penduduk yaitu 1:1.000 penduduk. Pemenuhan tempat tidur perawatan di Puskesmas diharapkan mampu mendukung pencapaian target rasio tempat tidur sesuai standar WHO tersebut.

Tabel 2.7 menunjukkan pula jumlah dan kondisi Pustu yang tersebar di 25 wilayah kerja Puskesmas. Sampai dengan tahun 2024 jumlah bangunan Pustu di Kabupaten Sikka sebanyak 68 Pustu, dimana 30 Pustu dalam kondisi baik, 2 Pustu dengan kondisi bangunan rusak ringan, 7 Pustu dalam kondisi rusak sedang dan 29 Pustu mengalami rusak berat. Rasio Pustu terhadap penduduk pada tahun 2024 sebesar 1:5.097.

Sistem kesehatan di Indonesia saat ini ditandai dengan transformasi pelayanan kesehatan sebagai proses perubahan dan perbaikan sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas, akses, efisiensi, dan hasil kesehatan bagi individu dan masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan

kualitas layanan, menjangkau lebih banyak orang, membuat layanan lebih efisien, dan memastikan hasil kesehatan yang lebih baik. Salah satu pilar penting dalam transformasi pelayanan kesehatan adalah transformasi layanan primer. Pengembangan bangunan Puskesmas dan Pustu saat ini mempertimbangkan kebutuhan ruangan yang mendukung intergrasi layanan primer (ILP). Dengan dukungan anggaran yang tersedia, Dinas Kesehatan berupaya membangun Puskesmas dan Pustu berstandar ILP di wilayah Kabupaten Sikka.

Penyediaan rumah tinggal bagi tenaga kesehatan masih menjadi hal penting karena tidak semua tenaga kesehatan berasal dari wilayah kerja Puskesmas tempat mereka bekerja. Sampai dengan tahun 2024, bangunan rumah dinas tenaga kesehatan berjumlah 105 unit yang tersebar di 25 Puskesmas. Dari jumlah tersebut, rumah dinas yang layak ditempati dengan kondisi baik hanya berjumlah 50 unit. Rumah dinas dalam kondisi kondisi rusak ringan/rusak sedang berjumlah 18 unit sedangkan sebanyak 37 unit rumah dinas dalam kondisi rusak berat. Dinas Kesehatan perlu membuat perencanaan dan penataan rumah dinas di Puskesmas bagi petugas kesehatan sehingga mendukung keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan dalam bertugas.

Ketersediaan prasarana Puskesmas menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus dilengkapi dengan prasarana yang memadai. Sampai dengan tahun 2024, kondisi prasarana di Puskesmas dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel. 2.8
Kondisi Prasarana Puskesmas di Kabupaten Sikka
Tahun 2024

No.	Jenis Prasarana Puskesmas	Jumlah dan kondisi				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah
1	Kendaraan Ambulans Roda Empat	9	2	1	5	17
2	Kendaraan Pusling Roda Empat	7	1	2	8	18
3	Kendaraan Sepeda Motor	29	9	4	25	67
4	Kendaraan Pusling perairan	0	0	0	4	2
5	Laptop	123	15	9	53	200
6	Komputer	21	1	2	18	42
7	Printer	89	4	3	59	155
8	Genzet	11	2	2	20	35
9	IPAL	6	0	0	3	9

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sikka sebagian besar berada dalam bentangan daerah topografi dengan ketinggian 500-1.000 mdpl dimana zona ini mempunyai luas 70.216 Ha atau 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka. Topografi ini terlihat dari bentuk daerah pegunungan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Dengan topografi seperti ini prasarana pendukung pelayanan Puskesmas untuk mobilisasi pasien pada saat rujukan maupun mobilisasi petugas kesehatan untuk pendekatan pelayanan di masyarakat perlu diperhatikan dengan baik. Sampai dengan tahun 2024, jumlah kendaraan ambulans di Puskesmas sebanyak 17 unit dimana 9 unit dalam kondisi baik, 3 unit dalam kondisi rusak ringan/sedang dan 5 unit rusak berat. Selain kendaraan ambulans juga terdapat kendaraan pusling roda empat yang berjumlah 18 unit dengan kondisi baik sebanyak 7 unit, rusak ringan/sedang 3 unit dan rusak berat 8 unit.

Dalam rangka mobilisasi tenaga kesehatan, disiapkan kendaraan sepeda motor di Puskesmas yang pada tahun 2024 berjumlah 67 unit. Kondisi sepeda motor dalam keadaan baik berjumlah 29 unit, rusak ringan/sedang 13 unit dan rusak berat 25 unit. Peremajaan kendaraan roda dua bagi petugas Puskesmas diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama dalam rangka mendukung integrasi layanan primer di wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas Teluk Maumere, Puskesmas Palue dan Puskesmas Tuanggeo merupakan Puskesmas dengan wilayah kerja kepulauan sehingga membutuhkan kendaraan pusling perairan sebagai sarana transportasi baik untuk rujukan pasien maupun kegiatan pelayanan kesehatan di pulau-pulau sekitar. Pusling perairan di Puskesmas Teluk Maumere berjumlah 2 unit dengan kondisi rusak berat. Demikian pula di Puskesmas Palue terdapat 2 unit pusling perairan dengan kondisi rusak berat sedangkan Puskesmas Tuanggeo tidak memiliki pusling perairan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memiliki izin edar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Kelengkapan alat kesehatan sesuai dengan hasil inputan pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) tahun 2023 sebesar 46,26%, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 42,20%. Hal ini dapat terjadi mengingat sepanjang tahun 2024 tidak ada pengadaan alat kesehatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan sedangkan setiap tahun alat kesehatan mengalami penyusutan dan sebagian mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) berdasarkan hasil rekapan ASPAK masing-masing Puskesmas tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Persentasi kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan per Puskesmas di Kabupaten Sikka Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan			Kumulatif
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Paga	82.76	33.33	43.53	62.13
2	Lekebai	91.11	33.33	52.99	70.09
3	Wolofeo	81.03	29.63	42.16	60.35
4	Nanga	35.56	29.63	86.99	55.54
5	Bola	70.69	38.89	60.58	63.47
6	Habibola	73.33	29.63	31.09	52.07
7	Mapitara	100	38.89	30.61	66.13
8	Watubaing	100	25.93	34.29	66.31
9	Boganatar	100	20.37	63.51	77.44
10	Waigete	65.52	57.41	52.23	59.39
11	Tanarawa	75.56	35.19	39.81	57.22
12	Hewokloang	100	22.22	52.53	73.24
13	Waipare	77.78	25.93	33.41	54.84
14	Nelle	53.33	31.48	52.56	50.84
15	Palue	56.9	31.48	40.22	47.68
16	Tuanggeo	44.44	12.96	53.22	44.81
17	Koting	51.11	27.78	22.31	37.26
18	Nita	67.24	31.48	47.58	55.8
19	Magepanda	74.14	38.89	19.08	48.59
20	Kopeta	100	44.44	47.45	73.42
21	Wolomarang	95.56	35.19	41.6	67.94
22	Teluk Maumere	100	44.44	41.89	71.2

No.	Nama Puskesmas	Kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan			Kumulatif
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
23	Beru	84.21	29.63	41.65	61.73
24	Feondari	89.47	29.63	26.54	58.32
25	Kewapante	60	29.63	40.58	49.2
Rata-rata		73.88	30.96	42.20	56.92

Sumberr: ASPAK, 2024

Dari tabel 2.8 diatas, rata-rata ketersediaan sarana Puskesmas baru mencapai 73,88%, prasarana sebesar 30,96% dan alat kesehatan sebesar 42,20%. Secara kumulatif, ketersediaan SPA di Puskesmas rata-rata sebesar 56,92%. Target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 kabupaten/kota dengan SPA Puskesmas yang memenuhi standar adalah 64%. Dikatakan memenuhi standar apabila jumlah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pemenuhan SPA Puskesmas di wilayahnya minimal 60%. Dari 25 Puskesmas hanya terdapat 12 Puskesmas (48%) di Kabupaten Sikka yang kelengkapan SPA di Puskesmas sudah mencapai 60%.

Dinas Kesehatan berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran baik melalui Dana Alokai Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Dana Insentif Daerah mapun sumber-sumber anggaran lainnya untuk meningkatkan sarana, parasaran dan alat kesehatan Puskesmas. Dipihak lain, Puskesmas juga telah mengefektifkan dana operasional kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas untuk melakukan perawatan gedung Puskesmas meskipun dalam skala kecil serta pembelanjaan prasarana dan alat kesehatan Puskesmas.

3. UPT Laboratorium Kesehatan

UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dikepalai oleh pejabat struktural eselon IV/a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan UPT Laboratorium Kesehatan adalah melakukan pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman dan sumber air minum baik yang diambil secara langsung maupun rujukan dari Puskesmas. Tahun 2019, UPT Laboratorium Kesehatan di akreditasi oleh Kementerian Kesehatan dengan hasil lulus bersyarat, sehingga ada upaya-upaya pengembangan kegiatan termasuk kegiatan pemeriksaan sampel klinis.

Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan kondisi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan
 Tahun 2024

No.	Uraian	Standar	Ketersediaan
A.	Sarana Labkesda		
a.	Fungsi Administrasi		
1	Ruang Tunggu	Ada	Ada
2	Ruang Pendaftaran :		
	- Penerimaan Sampel	Ada	Ada
	- Pemberian Hasil	Ada	Ada
	- Loker Pembayaran	Ada	Ada
3	Ruang Konsultasi Pasien	Ada	Ada
4	Ruang Pimpinan	Ada	Ada
5	Ruang Rapat / Serbaguna	Ada	Ada
6	Ruang Tata Usaha	Ada	Ada
7	Ruang Tim Kerja	Ada	Ada
8	Ruang Arsip	Ada	Ada
9	Ruang Admin Pemeriksaan	Ada	Ada
10	Ruang Manajemen Mutu	Ada	Ada
b.	Fungsi Teknis		
	Sampling :		
11	Ruang Phlebotomi	Ada	Ada
12	Ruang Pengambilan Spesimen dahak	Ada	Ada
13	Toilet Pasien	Ada	Ada
14	Ruang Pengolahan Spesimen	Ada	Ada
	Media dan Reagensia :	Ada	Ada
15	Ruang Pembuatan dan Penyimpanan Media dan Reagen	Ada	Ada
	Mikrobiologi :		
	Ruang Bakteriologi Non-TB :	BSL 2	BSL 2
16	Anteroom	Ada	Ada
17	Ruang Mikrobiologi dan Parasitologi	Ada	Ada
18	Ruang Mikrobiologi Lingkungan	Ada	Ada
	Patologi Klinik dan Imunologi :	Ada	Ada
19	Ruang Patologi Klinik dan Imunologi	Ada	Ada
	Biomolekuler	BSL 2	BSL 2
20	Anteroom	Ada	Ada
21	Ruang Ekstraksi	Ada	Ada
22	Ruang Mixing	Ada	Ada
23	Ruang Adisi	Ada	Ada
24	Ruang Amplifikasi	Ada	Ada
25	Exit Anteroom	Ada	Ada
	Kesehatan Lingkungan dan Toksikologi		
26	Ruang Alat Sampling Lingkungan	Ada	Ada
27	Ruang Timbang	Ada	Ada
28	Ruang Preparasi Sampel Lingkungan	Ada	Ada
29	Ruang Kimia Lingkungan	Ada	Ada
30	Ruang ICSP-MS	-	Ada
	Ruang Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit		

No.	Uraian	Standar	Ketersediaan
31	Ruang Alat Sampling	Ada	Ada
32	Ruang Pengelolaan Sampel Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Ada	Ada
33	Ruang Uji Resistensi dan Efikasi	Ada	-
	K3 dan Pengelolaan Limbah :		
34	Area IPAL	Ada	Ada
35	Ruang B3	Ada	Ada
36	Ruang TPS	Ada	Ada
c.	Fungsi Penunjang		
37	Ruang Sterilisasi dan Cuci Alat Glassware Spesimen klinik	Ada	-
38	Ruang Sterilisasi dan Cuci Alat Glassware Sampel Lingkungan	Ada	Ada
39	Ruang Logistik	-	Ada
40	Ruang Sarana dan Prasarana	Ada	Ada
41	Mushola	Ada	-
42	Toilet Petugas	Ada	Ada
43	Ruang Panel Listrik	Ada	Ada
44	Ruang Server IT	Ada	Ada
45	Ruang AHU	Ada	Ada
46	Ruang Gas	Ada	Ada
47	Ruang Pompa / Tangki Air	Ada	Ada
48	Ruang Genset	Ada	Ada
49	Ruang Trafo PLN	Ada	Ada
50	Pos Jaga (Security)	Ada	Ada
51	Ruang Laktasi	Ada	Ada
52	Ruang RO	Ada	Ada
53	Ruang CCTV	-	Ada
54	Lahan Parkir	Ada	Ada
B.	Prasarana Labkesda		
1	Genzet	2	2
2	IPAL	2	2
3	Mobil labkes	2	2
4	Sumur Bor	2	2
5	Listrik	60.000kwh	56.000kwh
6	UPS	5	-
7	APAR	10	5
8	Telekomunikasi (Internet)	1	1
9	AC Split	1	9
10	Meja	15	
11	Kursi	20	
12	Lemari	10	
13	Ac standing	4	1
14	Komputer	5	1
15	laptop	4	1
16	printer	4	2
17	LCD	1	
C.	Alat Kesehatan		
1	Chemistry Analyser	1	1

No.	Uraian	Standar	Ketersediaan
2	Photometer	1	1
3	Urine Analyser	1	2
4	Real Time PCR	1	1
5	Digital Colony Counter	2	1
6	Dissolved Oxygen (DO) meter	1	1
7	Turbidimeter	1	1
8	TDS	1	1
9	Anemometer	1	1
10	Thermohygro barometer	1	1
11	Biochemical oxygen Demand Incubator(BOD)incubator	1	1
12	Degecator	1	1
13	Spectrophotonator	1	1
14	Chemical oxygen Demand Incubator(COD) reactor	1	1
15	Low speedcentrifuge (darah dan urine)	1	1
16	Blosafety Cabinet Class II type A2	1	1
17	Rotator Plate	1	1
18	Lemari Asam	2	2
19	Freezer 20 with raek system	3	1
20	RefrigatorSabarotong Grade (untuk reagen)	3	2
21	Oven Incubator	3	3
22	Vortex	1	1
23	Buret Makro	3	3
24	Buret Mikro	4	4
25	Steam Sterilizer	2	2
26	Microscope Binocular	4	4
27	Refrigerated Centryfuge(High Speed)	1	1
28	Cool Boks Sample/Spesimen	1	2
29	Rak Tabung	1	1
30	Beaker Glass	1	1
31	Labu Ukur	1	1
32	Erlenmeyer Flash	1	1
33	Petri Disk	1	1
34	Mikropipet (20 - 200 Mikron)	1	1
35	Mikropipet (100 - 1000 Mikron)	1	1
36	Mikropipet (1 - 10 Mikron)	1	1
37	Biosafety Cabinet Class II Type A 2	1	1
38	Laminar Air Flow	1	1
39	Inductively Couplet Plasma Mass Spectrometry	1	1
40	Oven	2	1
41	Water treatment System (RO)	1	1

Sumber: Olahan UPT Laboratorium Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam mendukung pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sikka semakin ditingkat setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan UPT Laboratorium Kesehatan sebagai laboratorium rujukan di Pulau Flores. Saat ini UPT Laboratorium

Kesehatan sementara mempersiapkan tatakelola manajemen pelayanan menjadi badan layanan umum daerah.

4. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Berkembangnya tuntutan dan pilihan kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dibarengi pula dengan meningkatnya pertumbuhan klinik swasta di Kabupaten Sikka. Untuk mengatur rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan dengan berperan sebagai regulator dalam memberikan rekomendasi pengurusan ijin operasional rumah sakit dan klinik kesehatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Sikka. Adapun jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10
Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan
Tahun 2024

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH			
		PEMERINTAH KABUPATEN	TNI/POLRI	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
RUMAH SAKIT					
1	RUMAH SAKIT UMUM	1		2	3
2	RUMAH SAKIT KHUSUS				-
SARANA PELAYANAN LAIN					
1	KLINIK PRATAMA		2	9	11
2	KLINIK UTAMA			1	1
3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER			7	7
4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI			2	2
5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS			1	1
6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN				-
7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT				-
8	GRIYA SEHAT				-
9	PANTI SEHAT	0			-
10	UNIT TRANSFUSI DARAH	1			1
11	LABORATORIUM KESEHATAN	1		7	8

SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN					
1	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)			8	8
2	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)			1	1
3	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)			4	4
4	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)			4	4
5	APOTEK			32	32
6	TOKO OBAT			13	13

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Dari tabel 2.10 di atas dapat diketahui bahwa jumlah rumah sakit di Kabupaten Sikka tahun 2024 masih sama dengan jumlah rumah sakit pada tahun 2020. Namun demikian ada penambahan jumlah balai/klinik pengobatan dan praktek dokter bersama dari 8 balai/klinik pengobatan pada tahun 2020 menjadi 12 klinik (pratama dan utama) pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2022 memulai pekerjaan pembangunan 1 unit rumah sakit dengan Tipe D di Kecamatan Doreng yang bersumber dari dana pinjaman daerah. Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D di Kecamatan Doreng perlu diselesaikan mengingat lokasi pembangunan yang berada di lokasi terpencil di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sikka dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Rumah Sakit ini diharapkan dapat menjadi pusat rujukan untuk 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Doreng, Kecamatan Bola dan Kecamatan Mapitara serta kecamatan sekitarnya.

5. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk- bentuk kegiatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar serta mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan maupun peningkatan status gizi. Bentuk-bentuk UKBM yang ada di masyarakat adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); Pos Klinik Desa (Polindes); Posyandu dan Posbindu PTM. Jenis dan jumlah UKBM di masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Jenis dan Jumlah UKBM per Puskesmas di Kabupaten Sikka
Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Σ Desa	Σ Poskes des	Σ Polin des	Σ Posyandu Balita					Posbi ndu PTM
					Pra tama	Ma dya	Purna ma	Man diri	Jum lah	
1.	Nanga	9	2	5	0	1	24	4	29	9
2.	Nita	15	3	9	4	5	20	16	45	12
3.	Paga	14	3	4	0	16	22	0	38	6
4.	Wolofeo	10	3	3	0	0	7	25	32	8
5.	Waigete	11	3	6	0	30	16	0	46	9
6.	Boganatar	5	1	4	0	3	10	1	14	13
7.	Lekebai	7	1	4	1	12	5	3	21	15
8.	Hewokloang	7	1	6	1	16	7	0	24	7
9.	Wolomarang	4	1	3	4	5	10	5	24	2
10.	Koting	7	1	5	0	0	0	18	18	7
11.	Teluk Maumere	6	2	4	0	4	14	6	24	6
12.	Tanarawa	7	2	6	0	8	17	0	25	7
13.	Kopeta	4	0	4	0	0	22	0	22	4
14.	Watubaing	15	0	8	0	7	12	17	36	8
15.	Beru	8	1	7	0	0	18	20	38	7
16.	Palue	4	0	3	14	0	0	0	14	4
17.	Bola	8	3	3	0	5	15	1	21	6
18.	Feondari	5	3	5	16	0	0	0	16	5
19.	Tuanggeo	4	0	1	2	3	8	0	13	4
20.	Habibola	9	5	2	0	0	6	25	31	7
21.	Magepanda	8	3	2	1	12	12	2	27	5
22.	Mapitara	4	2	4	2	4	12	2	20	4
23.	Nelle	5	3	1	0	1	14	0	15	5
24.	Kewapante	9	1	7	0	0	26	0	26	8
25.	Waipare	9	2	6	0	0	26	8	34	9
Jumlah		194	46	112	45	132	323	153	653	177

Sumber : Data Olahan Puskesmas, 2024

Tabel 2.11 menunjukkan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebanyak 194 desa. Pertambahan jumlah desa dan kelurahan berdampak pada bertambahnya pula UKBM yang berkembang di masyarakat.

Poskesdes di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 berjumlah 46 Poskesdes dan Polindes sebanyak 112 Polindes. Posyandu di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2024 berjumlah 653 Posyandu. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 649 Posyandu. Sebagian besar Posyandu di Kabupaten Sikka berstratifikasi purnama yaitu sebanyak 323 Posyandu (49,5%) diikuti Posyandu mandiri sebanyak 153 Posyandu (23,4%), Posyandu madya sebanyak 132 Posyandu (20,2%) dan posyandu pratama sebanyak 45 Posyandu (6,9%). Perkembangan Posbindu PTM cukup baik seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 177 Posbindu PTM

dari 194 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sikka.

2.1.3. Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

a) Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

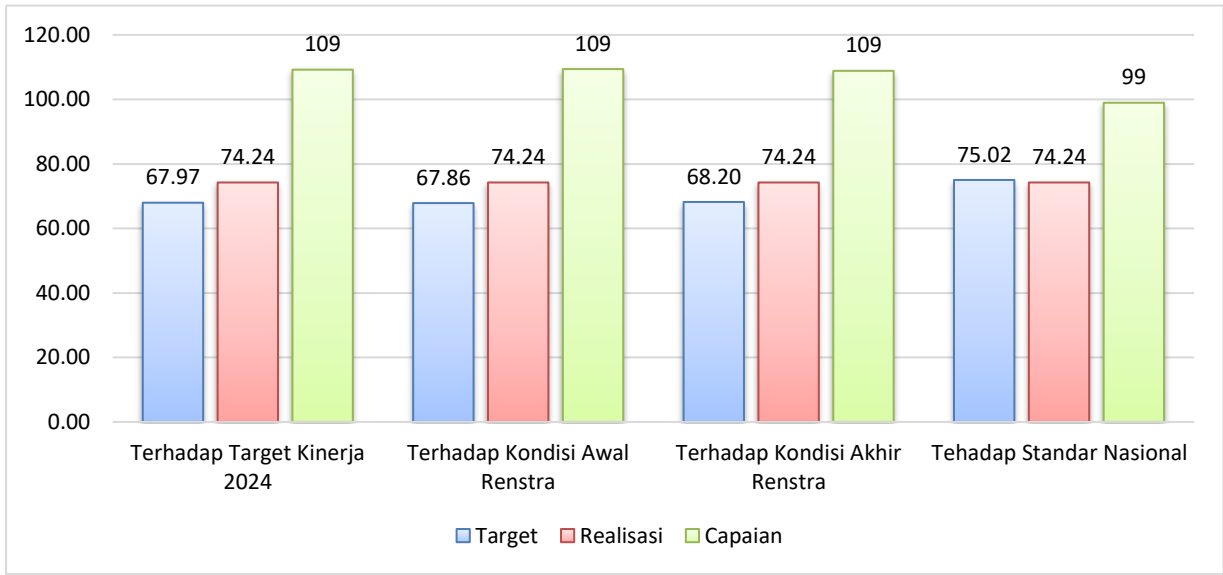
No	Jenis Indikator	Satuan	Target Tahun					Realisasi Tahun:					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	0	0	0	0	6	7	9	8	3	2	-	-	-	-	167
2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	0	0	0	0	10	9	10	14	9	12	-	-	-	-	85
3	Prevalensi stunting	Persen	20	16	0	0	9.9	19.6	18.2	13.8	15.3	12.21	102	86	-	-	77
4	Prevalensi wasting	Persen	0.5	0.4	0.3	0,2	9.8	7.00	6.90	10.60	10.50	13.07	(1,200)	(1,525)	(3,333)	-	67
5	Insidensi HIV	per 100.000 penduduk	0.24	0.28	0.35	0.41	0.18	0.32	0.26	0.28	0.31	0.29	67	107	120	124	39
6	Angka keberhasilan pengobatan (<i>succses rate</i>) TB BTA+	Persen	92	93	94	95	93	90.1	91.1	91.3	84.6	86	98	98	97	89	92
7	IR DBD	per 100.000 penduduk	50	45	40	30	100	562	55.97	144.7	243.93	243.61	(924)	76	(162)	(613)	(44)
8	Annual Paracite Incidence (API)	per 1000 penduduk	0	0	0	0	0.5	0.23	0.19	1.58	0.84	1.2	-	-	-	-	(40)
9	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18 tahun	Persen					21.8					0.7	-	-	-	-	3
10	Prevalensi penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendai di Puskesmas FKTP	Persen					60					5.9	-	-	-	-	10
11	Prevalensi penyandang dia betes melitus yang gula darahnya terkendai di Puskesmas FKTP	Persen					60					17.3	-	-	-	-	29

Dari tabel 2.12 diatas dapat diketahui bahwa pencapain terhadap target indikator kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka hanya indikator jumlah kematian Ibu yang sudah memenuhi target pada tahun 2024 rasio pencapaian 167%. 10 indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yang lain belum mencapai target yang ditentukan.

1) Indikator Sasaran 1: Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata waktu hidup yang tersisa atau banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Persentase target dan realisasi indikator Usia Harapan Hidup tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Usia Harapan Hidup
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024

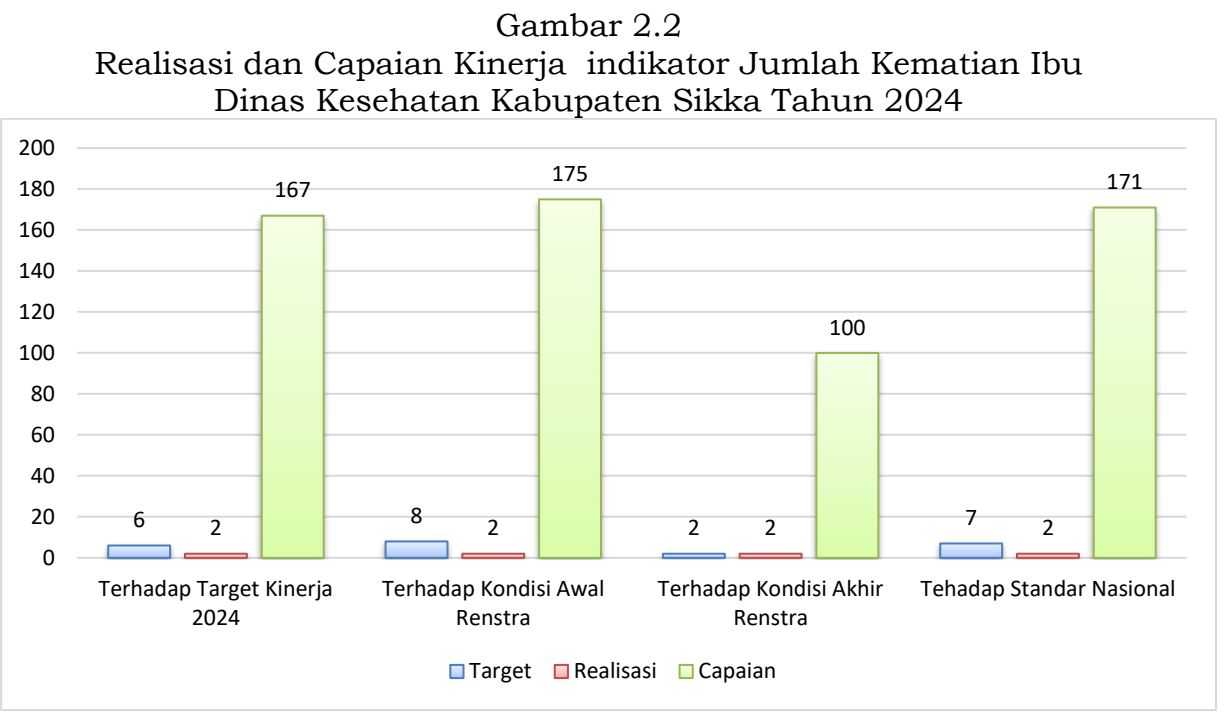


Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Usia Harapan Hidup sudah melebihi target kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 109%. Capaian kinerja juga dikatakan berhasil jika dibandingkan dengan kondisi awal dan target pada kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

2) Indikator Sasaran 2: Jumlah kematian ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera atau kejadian insidental. Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.



Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

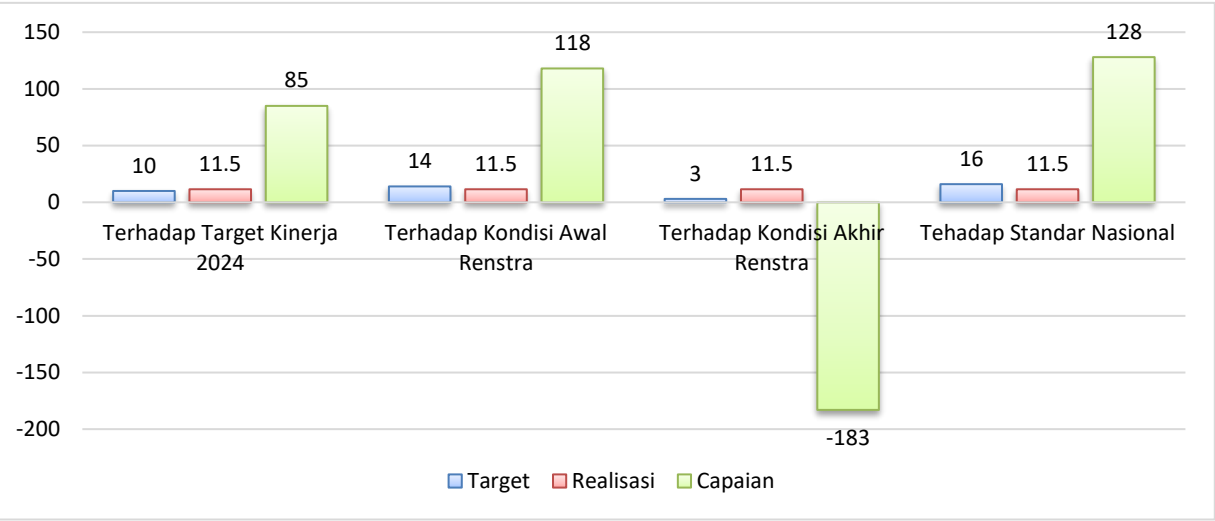
Berdasarkan Gambar 2.2 diatas, bahwa jumlah kematian ibu di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebanyak 2 kasus kematian ibu. Meskipun masih ada kematian ibu, akan tetapi angka ini sudah melampaui target kinerja dengan persentase lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan berhasil baik terhadap target kinerja tahunan, kondisi awal dan target kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 maupun terhadap target nasional sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kematian ibu mengalami penurunan yang signifikan. Dua kasus Kematian ibu di Kabupaten Sikka disebabkan karena perdarahan dan gangguan sistem

peredaran darah (jantung).

3) Indikator Sasaran 3: Angka Kematian bayi

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Jumlah Kematian Ibu
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

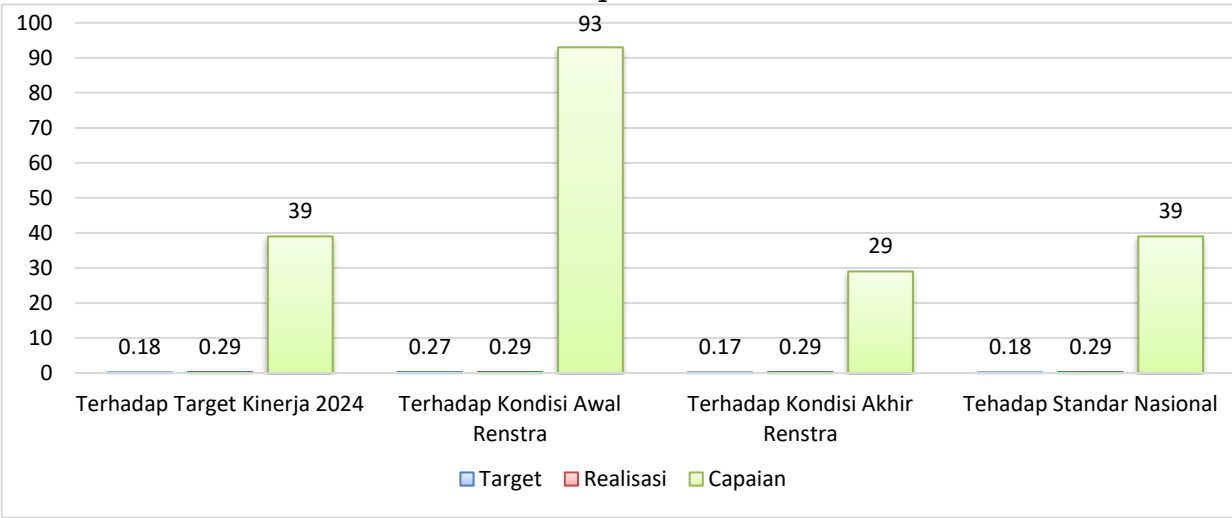
Jumlah kematian bayi di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebanyak 47 kasus. Penyebab kematian bayi didominasi oleh berat badan lahir rendah, asfiksia dan diare. Berdasarkan Gambar 2.3 diatas, capaian kinerja indikator sasaran angka kematian bayi pada tahun 2024 hanya mencapai 85% dari target kinerja sesuai Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 sehingga bisa dikatakan belum berhasil, walaupun jika dibandingkan dengan kondisi awal Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, kinerja indikator angka kematian bayi tahun 2024 di kabupaten Sikka sudah lebih tinggi dengan persentase diatas 100%. Beberapa faktor penyebab indikator angka kematian bayi belum mencapai target antara lain bayi baru lahir dengan asfiksia belum dapat ditangani secara masimal di Puskesmas karena keterbatasan peralatan *emergency*

neonatal; masih adaa bayi risiko tinggi yang terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya karena keluarga terlambat mengambil keputusan untuk merujuk; masih tingginya ibu hamil dengan anemia pada periode kehamilan trimester 3; masih tingginya ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) sehingga melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR); dan masih tingginya ibu hamil yang masuk dalam kelompok berisiko yaitu ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, ibu hamil dengan jarak kelahiran kurang dari 2 tahun serta ibu hamil dengan jumlah anak lebih dari 4 orang.

4) Indikator Sasaran 4: Insidensi HIV

Insidensi HIV adalah jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun selama periode waktu tertentu. Insidensi HIV merupakan indikator Impact, yang menggambarkan besaran transmisi penyakit di populasi. Semakin turun insidensi, akan semakin kecil pula penambahan ODHA, yang pada akhirnya akan menuju eliminasi penyakit HIV. Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini

Gambar 2.4
Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Insidensi HIV
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



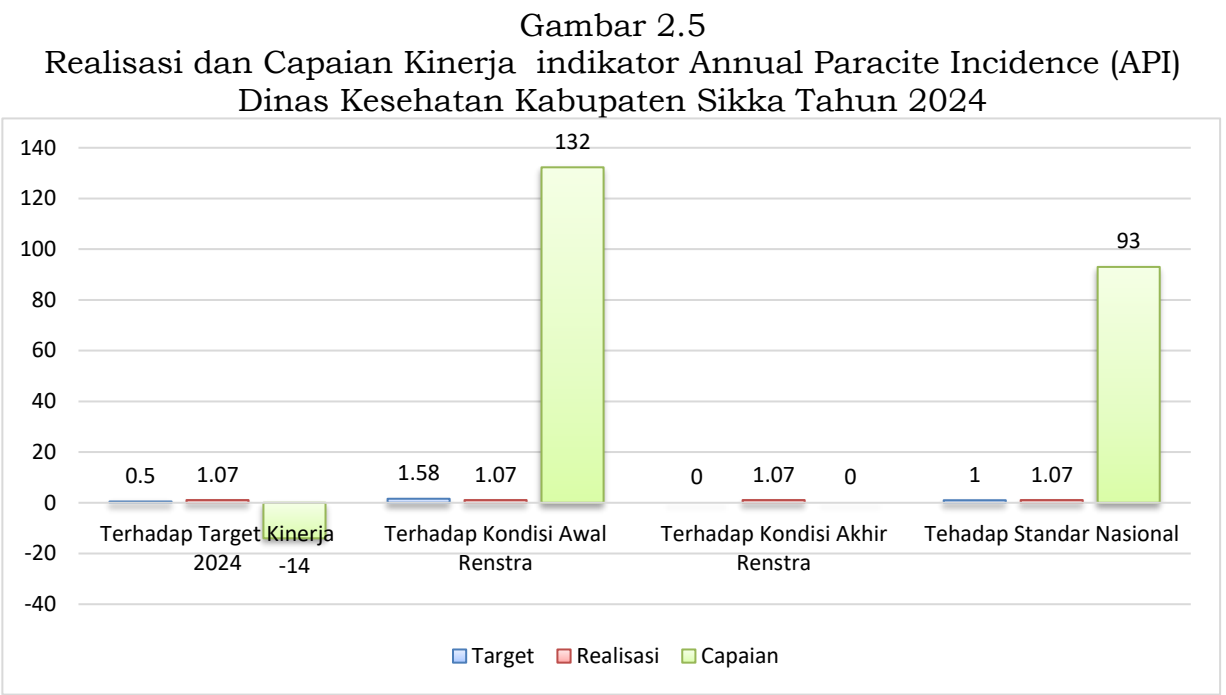
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa insidensi HIV di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 berada pada angka 0.29 per 1.000 penduduk. Capaian kinerja indikator sasaran insidendi HIV pada tahun 2024 belum berhasil mencapai 100% baik terhadap target kinerja tahun 2024, terhadap kondisi awal dan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan

Tahun 2024-2026 serta terhadap target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

5) Indikator Sasaran 5: Annual Paracite Incidence (API)

Annual Parasite Incidence (API) adalah indikator yang digunakan untuk menentukan trend morbiditas malaria dan menentukan endemisitas suatu daerah (masih terjadi penularan malaria). API adalah jumlah kasus positif malaria per seribu penduduk pada satu tahun. Persentase target dan realisasi indikator sasaran Annual Paracite Incidence tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini:



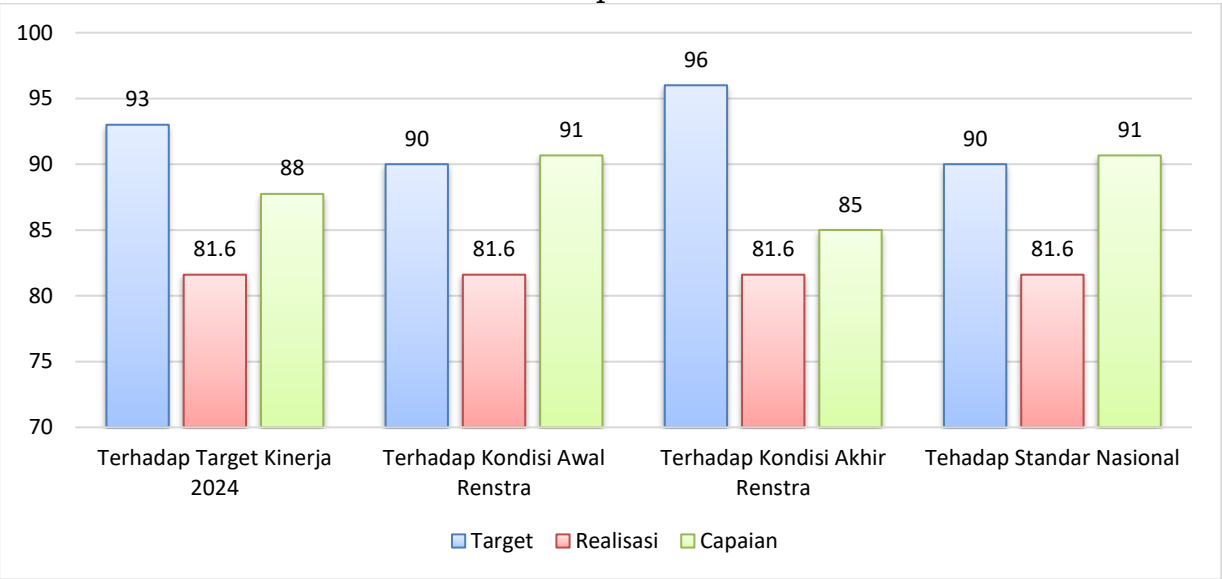
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Dari Gambar 2.5 dapat diketahui bahwa Annual Paracite Incidence (API) di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebesar 1.07 per 1.000 penduduk. Capaian kinerja API tahun 2024 terhadap target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 masih rendah yaitu pada angka (14) %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator API pada kondisi awal Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, capaian kinerja indikator API tergolong tinggi karena berada pada angka 132%. Terhadap target realisasi indikator API sebesar 0.00 per 1.000 penduduk pada kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, capaian indikator API Tahun 2024 juga tergolong rendah. Demikian juga terhadap Target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, capaian kinerja indikator API baru mencapai 93%.

6) Indikator Sasaran 6: Succes Rate TB (BTA +)

Success Rate TB (BTA+) adalah Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberculosis. Persentase target dan realisasi indikator sasaran Success Rate TB (BTA+) tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini:

Gambar 2.6
Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Succes Rate TB (BTA +)
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



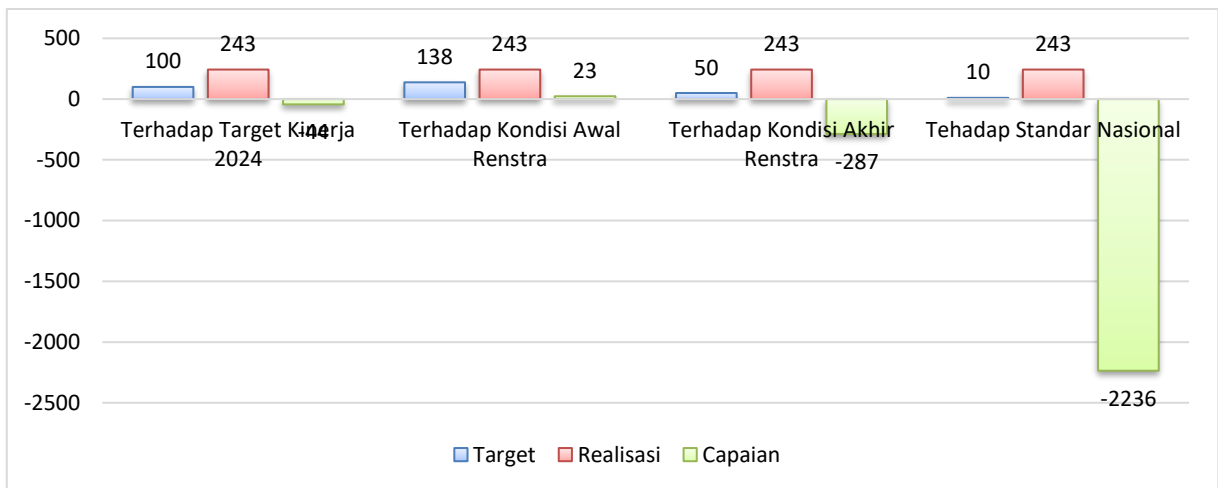
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Realisasi kinerja Success Rate TB (BTA+) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebesar 81,6%. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, kondisi awal dan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 serta Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 belum mencapai target yang ditentukan. Capain kinerja terhadap beberapa indikator tersebut masih berada pada angka 85% - 91%.

7) Indikator Sasaran 7: Incidence Rate (IR) DBD

Insidensi rate (IR) DBD adalah angka kejadian baru kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Persentase target dan realisasi indikator sasaran Insidensi Rate (IR) DBD di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini:

Gambar 2.7
Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Incidence Rate (IR) DBD
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



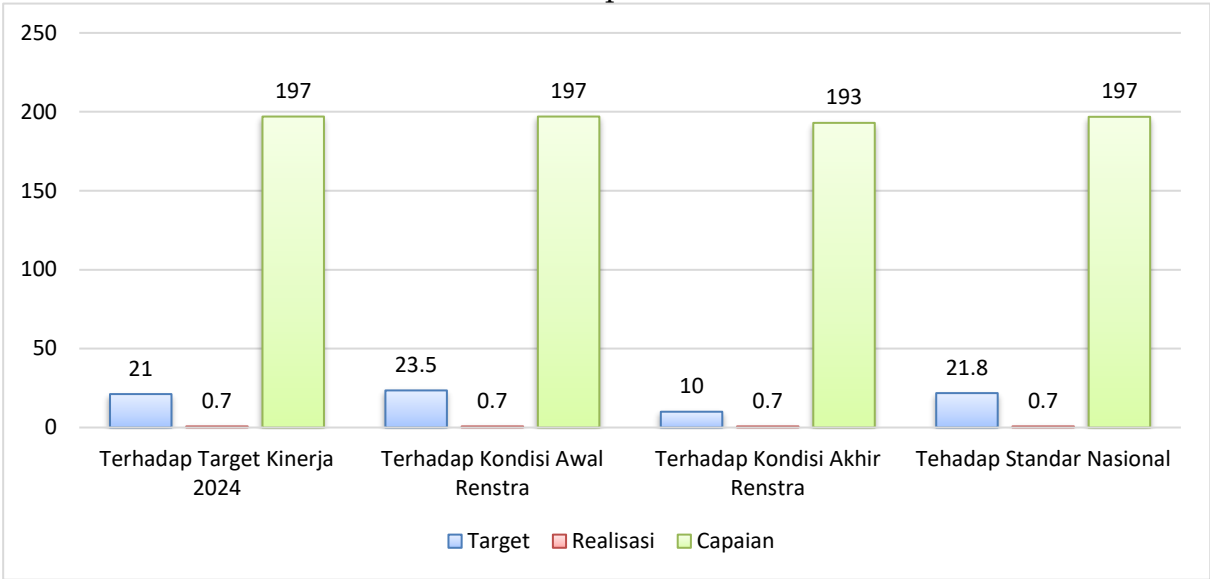
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Angka IR DBD di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 adalah 243 per 100.000 penduduk. Angka ini mengindikasikan bahwa kasus baru demam berdarah dengue masih sangat tinggi. Angka ini menyebabkan capaian kinerja indikator IR DBD Tahun 2024 terhadap target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 sangat rendah yaitu (44)%. Demikian juga capaian kinerja terhadap kondisi awal dan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 serta Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang menunjukkan persentase dibawah 25%.

8) Indikator Sasaran 8: Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 Tahun

Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun adalah Kasus obesitas pada penduduk usia > 18 tahun dengan kategori IMT >27 pada periode tertentu. Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai dengan akumulasi berlebih lemak tubuh yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini:

Gambar 2.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Obesitas pada Penduduk
Usia > 18 Tahun
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

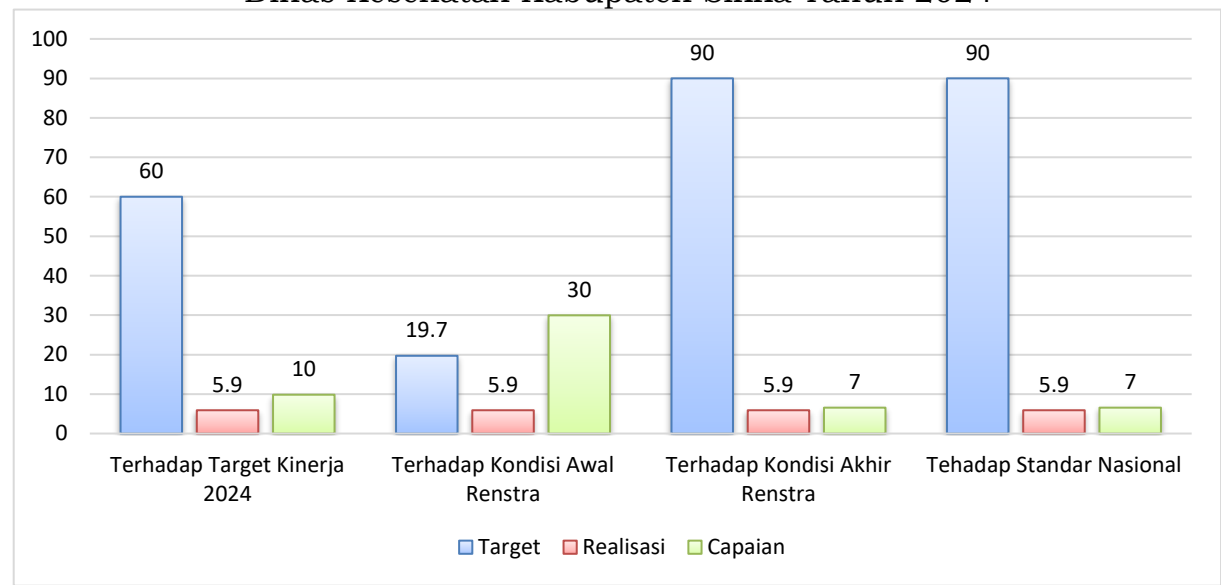
Berdasarkan Gambar 2.8 diatas, capaian kinerja indikator sasaran prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 dapat disimpulkan sangat baik. Terhadap target tahun 2024, kondisi awal dan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 maupun terhadap Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, capaian kinerja menunjukkan persentase diatas angka 100%. Meskipun angka capaian kinerja prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun di Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 lebih dari 100% akan tetapi belum semua sasaran yaitu penduduk yang berusia > 18 tahun telah dilakukan skrining.

9) Indikator Sasaran 9: Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali di Puskesmas/FKTP

Penyandang hipertensi dikatakan tekanan darahnya terkontrol di Puskesmas/FKTP jika jika tekanan darah Sistol <140mmHg dan diastole < 90 mmHg. Tekanan sistol dan diastol turun dari pemeriksaan sebelumnya dalam kurun waktu 1 tahun dengan jumlah pemeriksaan minimal 3 kali (3 bulan). Persentase target dan realisasi indikator sasaran Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali di Puskesmas/FKTP di

Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut ini:

Gambar 2.9
Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali di
Puskesmas/FKTP
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



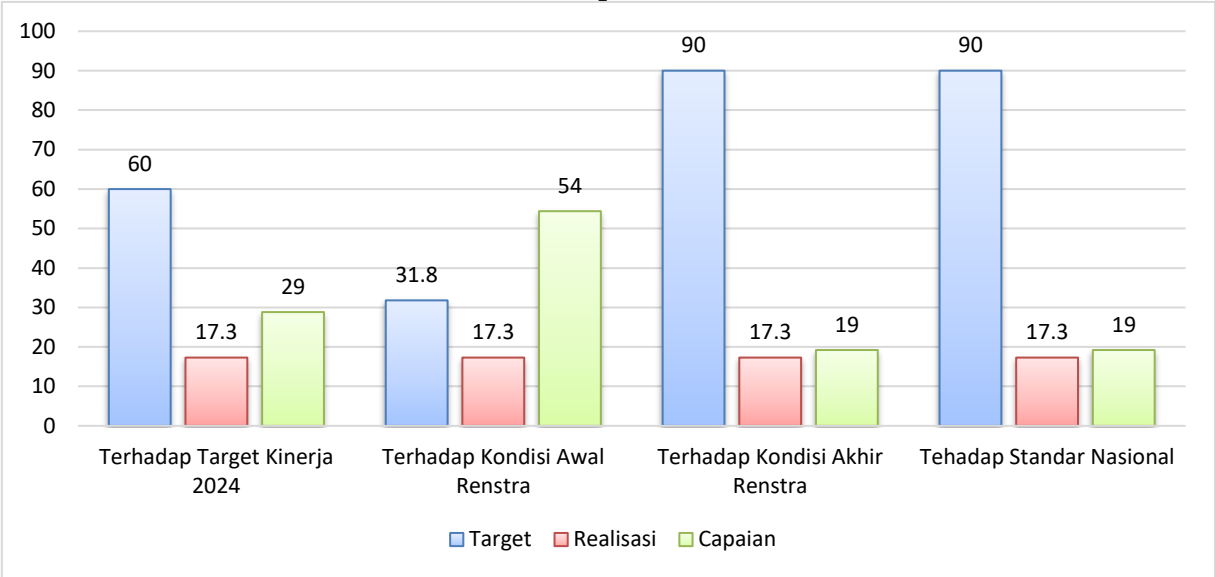
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 3.9 diatas, diketahui bahwa realisasi indikator sasaran Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali di Puskesmas/FKTP di Kabupaten Sikka Tahun 2024 baru mencapai 5,9% dengan capaian indikator masih dibawah 30% baik terhadap target Tahun 2024 serta kondisi awal dan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 maupun terhadap target Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

10) Indikator Sasaran 10: Persentase Penyandang Diabetes Melitus yang Gula Darahnya Terkendali di Puskesmas/FKTP

Penyandang diabetes melitus gula darahnya terkontrol di puskesmas/FKTP apabila gula darah puasa < 126 mg/dl atau gula darah 2 jam pp nya < 200 mg/dl sebanyak minimal 3 kali (3 bulan) atau HbA1c <7% minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Persentase target dan realisasi indikator sasaran Penyandang diabetes melitus gula darahnya terkontrol di puskesmas/FKTP di Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut ini:

Gambar 2.10
Persentase Penyandang Diabetes Melitus yang Gula Darahnya Terkendali di
Puskesmas/FKTP
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



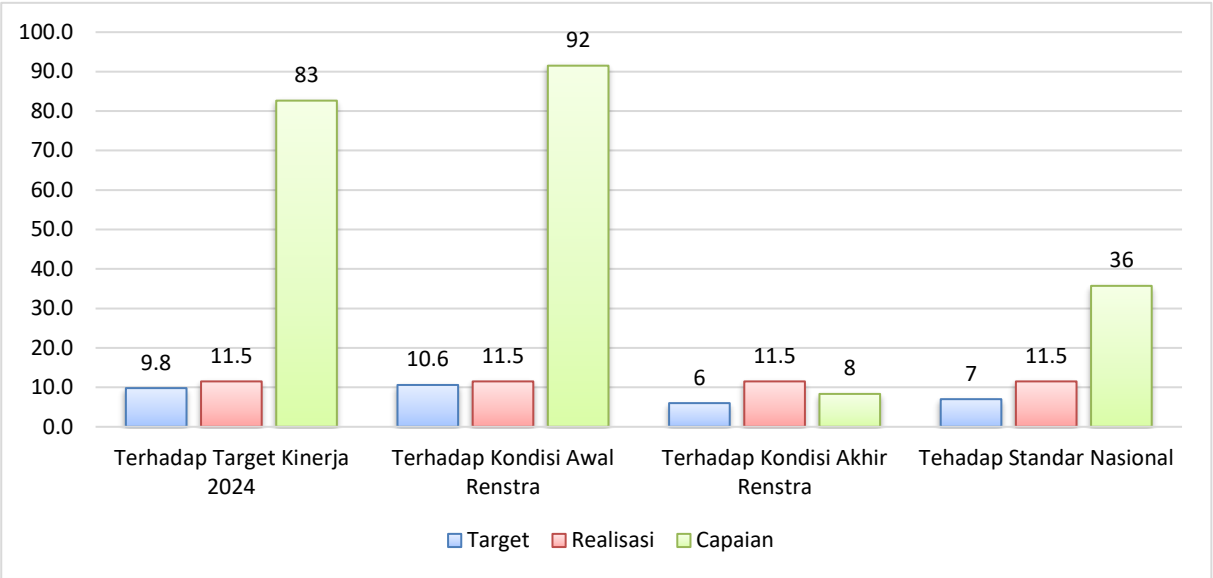
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.10 diatas diketahui bahwa persentase realiasi kinerja indikator penyandang diabetes melitus gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebesar 17,3%. Capaian kinerja baik terhadap target Tahun 2024 serta kondisi awal dan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 maupun terhadap target Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 masih dibawah 60% mengindikasikan capain kinerja pada indikator ini masih rendah.

11) Indikator Sasaran 11: Prevalensi Wasting

Prevalensi Wasting adalah persentase anak umur 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi wasting di Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut ini:

Gambar 3.11
Persentase Prevalensi Wasting
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



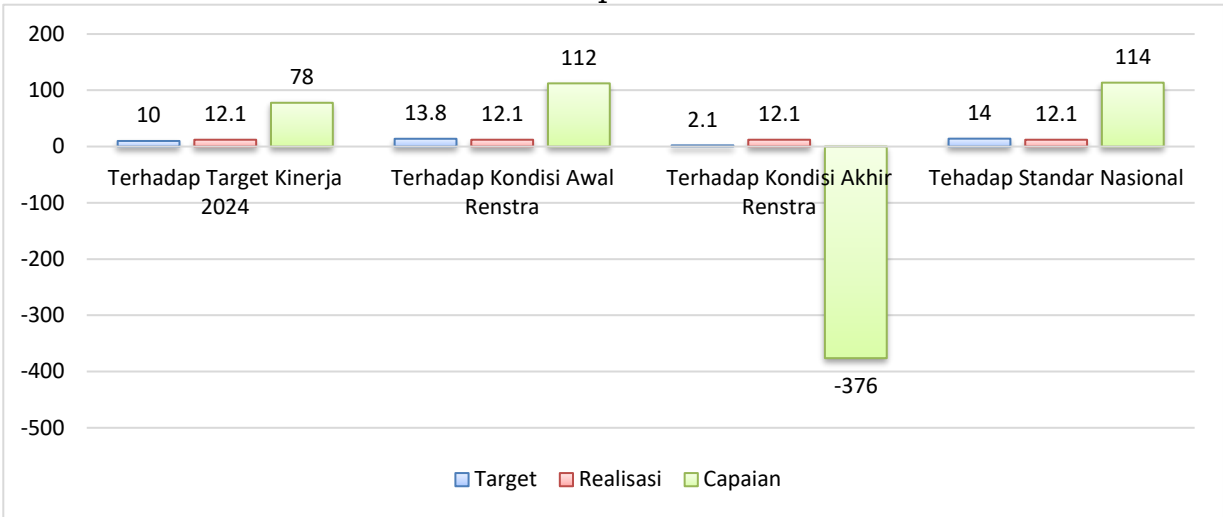
Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Dari Gambar 2.11 diatas, diketahui bahwa realisasi prevalensi wasting di Kabupaten Sikka tahun 2024 adalah 11.5%. Capaian kinerja prevalensi wasting terhadap target-target yang ditentukan belum mencapai 100% sehingga dapat dikatakan belum berhasil. Capaian kinerja terhadap target kinerja Tahun 2024 dan terhadap kondisi awal Renstra Dinas Kesehatan cukup baik dengan persentase capaian masing-masing sebesar 83% dan 92%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, maka capaian kinerja masuk dalam kategori sangat rendah karena berada dibawah angka 50%.

12) Indikator Sasaran 12: Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting adalah Persentase anak umur 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD. Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi stunting di Kabupaten Sikka tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut ini:

Gambar 2.12
Persentase Prevalensi Stunting
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024



Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 3.12 diatas diketahui bahwa realisasi kinerja indikator prevalensi stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah 12,1% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2024 sebesar 78% sehingga dapat dikatakan belum berhasil. Terhadap kondisi awal Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, capaian kinerja menunjukkan angka diatas 100%, akan tetapi terhadap kondisi akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, capaian kinerja tergolong sangat rendah dengan nilai capaian sebesar (376)%.

Selain pencapain target indikator kinerja seperti yang sudah digambarkan diatas, Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan yang diselenggarakan daerah Kabuaten/Kota terdiri atas 12 jenis pelayanan dasar SPM yaitu:

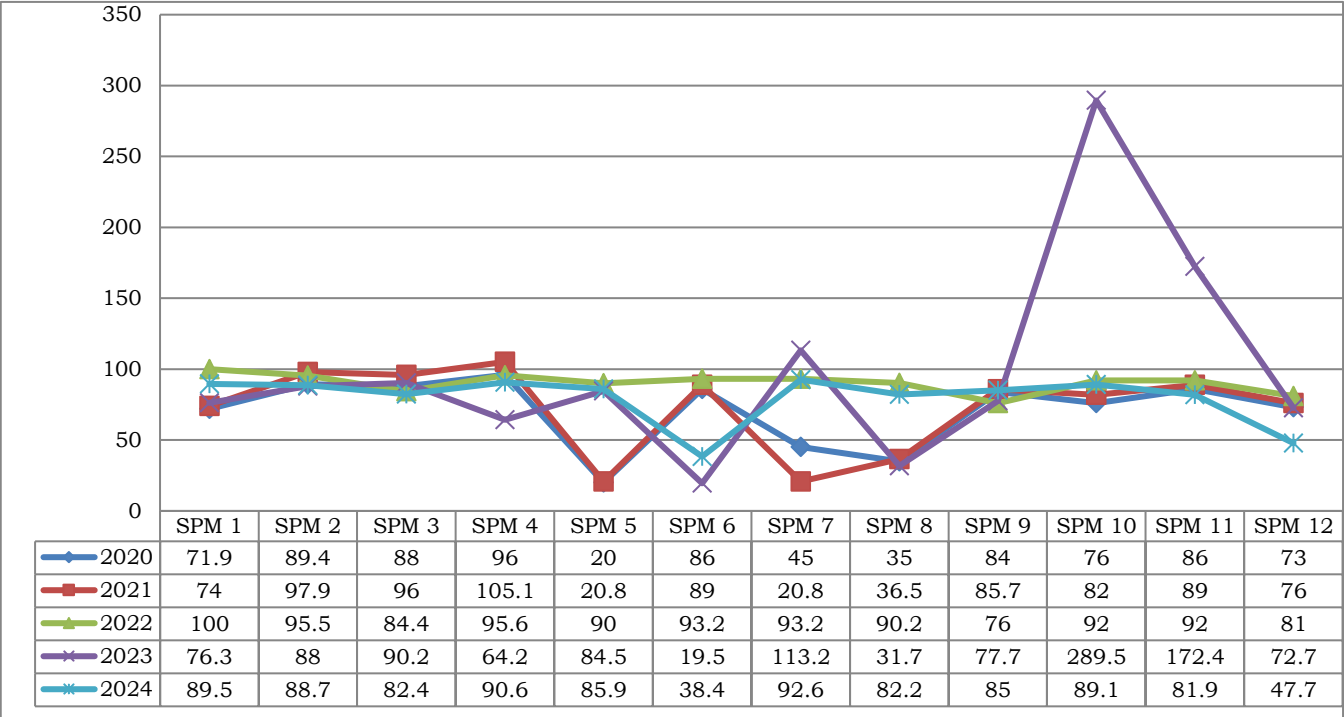
- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Penerapan SPM Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Target capaian kinerja 12 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah 100% yang berarti seluruh sasaran penduduk dari masing-masing jenis pelayanan SPM wajib mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun capaian kinerja 12 indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.13
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Grafik 2.13 diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2020, capaian kinerja tertinggi SPM Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan kesehatan balita yaitu sebesar 96% dan capaian terendah sebesar 20% pada indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Tidak terdapat indikator

yang mencapai target 100 persen pada tahun tersebut.

Selanjutnya tahun 2021, indikator pelayanan kesehatan balita mencapai 105%, sedangkan 11 indikator lainnya tidak mencapai target 100%. Capaian terendah sebesar 20,8% pada indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Tahun 2022, indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai target 100% sedangkan capaian terendah sebesar 76% pada indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Target 100% pada tahun 2023 tercapai pada tiga indikator SPM yaitu pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 289,5%, indikator pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 172,4 % dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 113,2%. Pada tahun 2024 cakupan kinerja SPM tertinggi hanya mencapai 92,6% yakni pada indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut sedangkan capaian terendah sebesar 38,4% pada indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif.

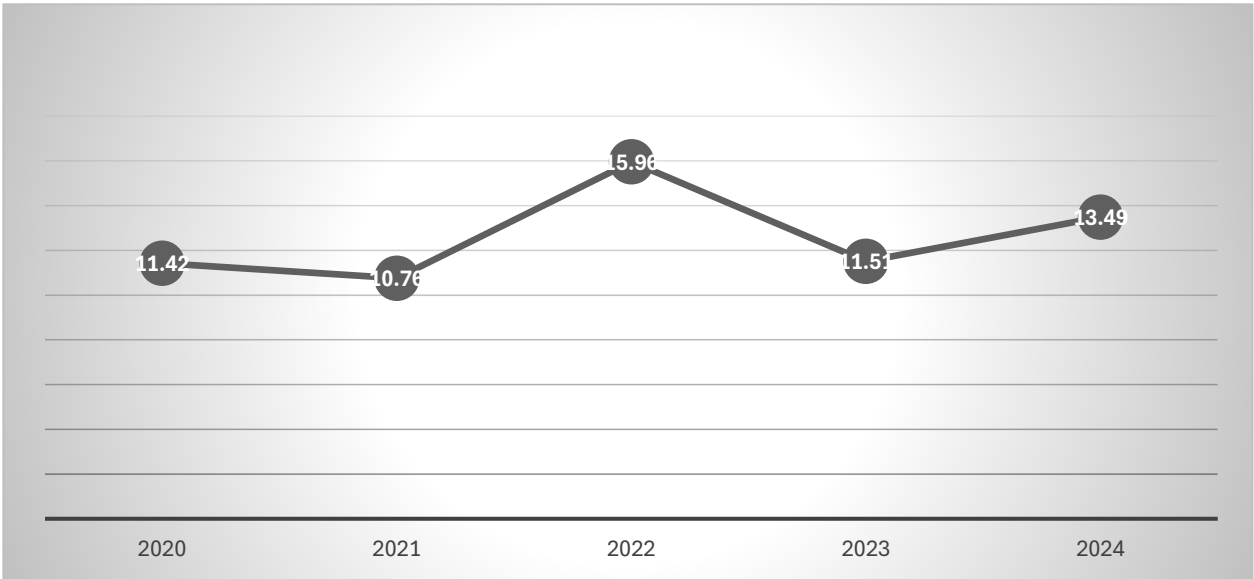
Grafik 2.12 juga memberikan gambaran bahwan dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan, terdapat 7 indikator yang belum terpenuhi capaian 100% selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Capaian kinerja Dinas Kesehatan selama periode tahun 2020-2024 juga dapat dilihat pada indikator-indikator berikut ini:

1. Angka Kematian Balita

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka kematian balita menggambarkan status kesehatan ibu dan anak. Angka kematian balita di Kabupaten Sikka tahun 2020-2024 tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 2.14
Angka Kematian Balita di Kabupaten Sikka
Tahun 2020 s/d 2024



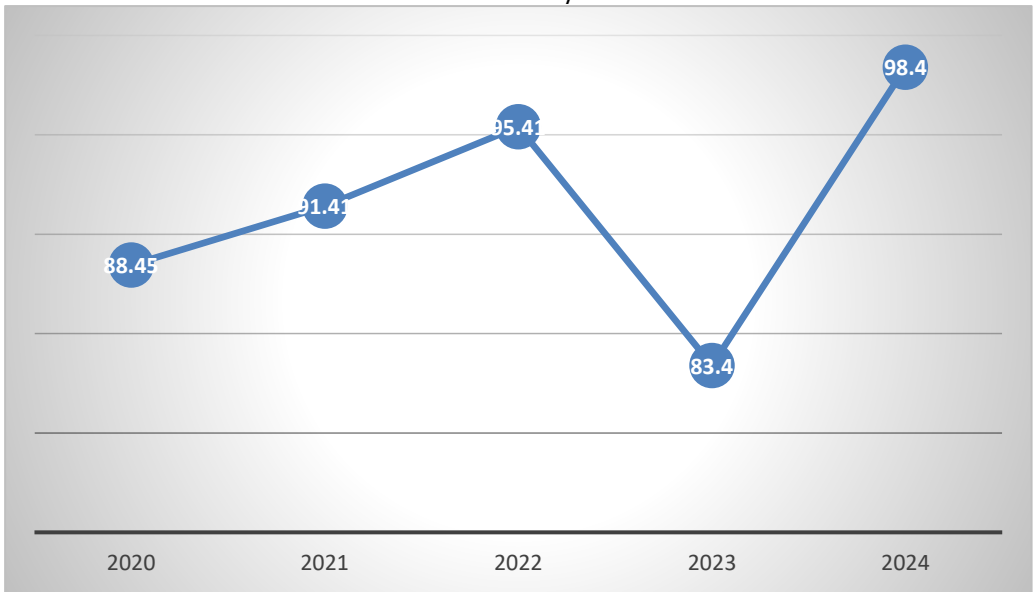
Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Angka kematian balita sepanjang lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, Angka kematian balita tercatat sebesar 11.42 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2024 sebesar 13.49 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 15.96 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan terendah pada tahun 2021 sebesar 10.76 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Cakupan Kepesertaan JKN

Pemerintah Kabupaten Sikka terus mendorong agar Kabupaten Sikka selalu berada pada posisi *Universal Health Coverage* (UCH) yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu tanpa biaya atau dengan biaya terjangkau. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sikka tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

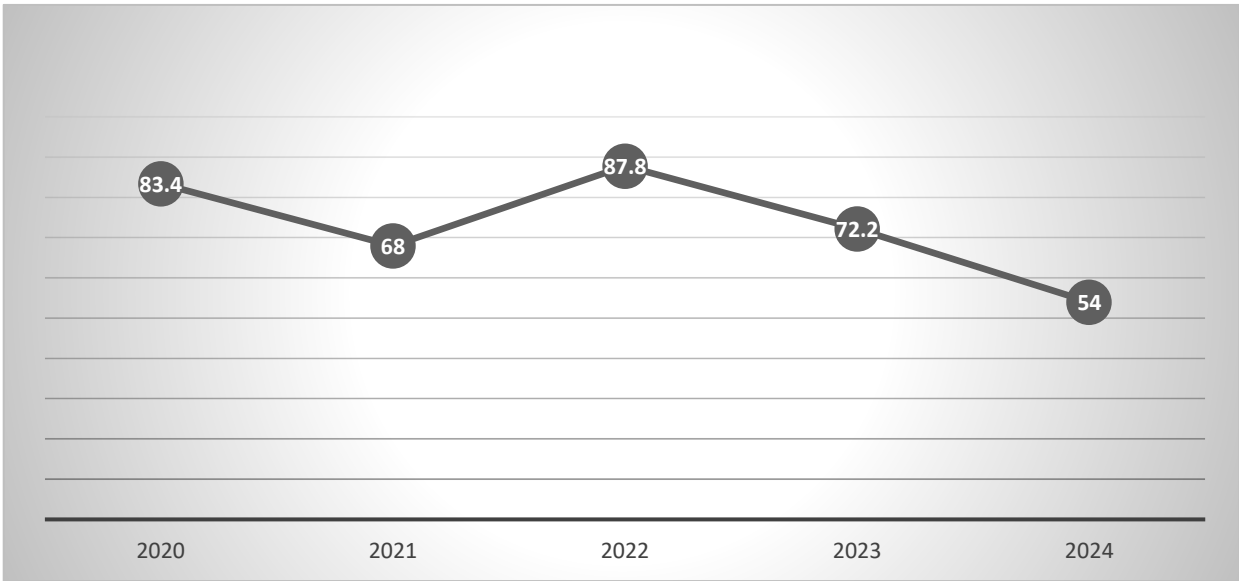
Grafik 2.15
Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Sikka
Tahun 2020 s/d 2024:



3. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Imunisasi bayi lengkap adalah pemberian serangkaian vaksin wajib yang diberikan sejak bayi lahir hingga usia 11 bulan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit berbahaya seperti TBC, hepatitis B, polio, difteri, tetanus, pertusis, dan campak, sehingga melindungi anak dari penyakit dan mencegah wabah penyakit menular. Cakupan imunisasi bayi lengkap selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2.16
Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Sikka
Tahun 2020 s/d 2024:



Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2024

Berdasarkan grafik 2.16 diatas, cakupan imunisasi bayi lengkap di

Kabupaten Sikka tergolong belum optimal. Pada periode lima tahun terakhir, cakupan imunisasi bayi lengkap tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 87.8%. pada tahun 2024, cakupan imunisasi bayi lengkap di Kabupaten Sikka hanya mencapai 54%. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, mengingat cakupan imunisasi bayi lengkap yang rendah dapat menyebabkan kekebalan kelompok menurun sehingga anak-anak mudah terserang penyakit.

b) Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah mengalami perubahan pada tahun 2021 dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Rasio realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada tahun 2020 sebesar 77.91 % turun menjadi 64.23 % pada tahun 2024. Rasio realisasi belanja juga mengalami penurunan dari 91.10% pada tahun 2020 menjadi 86.62% pada tahun 2024. Adapun rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan sebesar 6.25 % sementara pertumbuhan realisasi pendapatan minus 4,36%. Pertumbuhan anggaran belanja sebesar 10.3% dengan pertumbuhan realisasi belanja sebesar 0.78%.

Untuk lebih jelas, anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten SikkaTahun 2020 s/d Tahun 2024

NO	Uraian	Anggaran pada tahun:					Realisasi Anggaran Tahun:					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun:					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Pendapatan	20,510,470,000	22,010,470,000	22,010,470,000	25,042,181,437	26,018,790,500	15,979,530,559	14,318,957,480	13,338,996,244	15,521,446,738	16,712,425,520	77.91	65.06	60.60	61.98	64.23	6.25	(4.36)
II	Belanja	171,793,190,965	256,177,105,497	283,434,769,324	240,017,504,109	229,691,812,880	156,495,941,575	164,360,005,540	220,608,257,879	209,364,964,159	198,954,848,899	91.10	64.16	77.83	87.23	86.62	10.03	0.78
A	Belanja Tidak Langsung	54,462,976,757					53,084,761,648					97,47						
B	Belanja Langsung	117,330,214,208					103,411,179,927					88,14						
1	Program Admiistrasi Perkantoran	704,894,100					626,946,415					88,94						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,202,368,196					1,521,752,575					69,10						
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19,452,000					19,452,000					100,00						
5	Progranm Obat dan Perbekalan Kesehatan	5,733,207,904					5,331,195,205					92,99						
6	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	39,802,151,016					34,138,762,720					85,77						
7	Program : Pengawasan Obat dan Makanan	64,417,100					62,673,100					97,29						
8	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	84,414,800					44,102,800					52,25						
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3,500,000					-					-						
10	Program : Pengembangan Lingkungan Sehat	21,765,000					21,765,000					100,00						
11	Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3,267,143,400					2,982,560,800					91,29						

NO	Uraian	Anggaran pada tahun:					Realisasi Anggaran Tahun:					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun:					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2,439,550,000					909,995,000					37,30						
13	Program : Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	14,791,414,756					13,581,363,232					91,82						
14	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	45,328,119,936					41,724,929,080					92,05						
17	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	2,867,816,000					2,445,682,000					85,28						
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		65,842,747,592	95,444,980,808	91,588,124,129	107,266,835,042		63,718,942,886	89,918,801,181	89,732,069,318	105,283,179,592		96.7744288	94.2100888	97.9734766	98.1507281	19.35	0.51
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan		185,697,750,305	175,992,275,056	137,951,395,030	112,225,211,508		97,723,360,479	119,881,954,138	110,780,915,053	85,420,394,531		52.6249566	68.1177365	80.3043094	76.1151558	(15.16)	14.04
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		3,024,723,200	6,394,796,960	7,728,538,520	8,289,312,150		2,152,693,375	5,909,151,860	6,375,161,257	6,607,905,026		71.1699297	92.4056213	82.4885745	79.7159632	46.51	5.25
21	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		231,584,000	261,668,000	354,062,830	427,330,500		189,614,100	244,298,000	290,369,375	319,479,750		81.8770295	93.3618173	82.0106914	74.7617476	23.00	(2.32)
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		1,380,300,400	5,341,048,500	2,395,383,600	1,483,123,680		575,394,700	4,654,052,700	2,186,449,156	1,323,890,000		41.6861938	87.1374357	91.2776207	89.2636277	64.57	37.19

Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, yang menjadi kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat daerah.
2. Instansi vertikal.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah maupun swasta.
4. Sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat dan NGO.
6. Organisasi profesi kesehatan.
7. Seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sikka.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.2.1 Permasalahan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Sesuai dengan telaahan pada RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, masalah Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Masalah pokok masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat disebabkan oleh masalah kualitas kesehatan keluarga masih rendah. Selanjutnya masalah kualitas kesehatan keluarga masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah yang masing-masingnya disebabkan oleh beberapa serabut masalah yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Akar masalah kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat masih rendah

Akar masalah kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat masih rendah disebabkan karena beberapa serabut masalah sebagai berikut: a) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang; b) Pemenuhan layanan kesehatan masih rendah; c) Mutu pelayanan dan tatakelola di fasilitas kesehatan masih rendah; serta d) Penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi masih rendah.

2. Akar masalah mutu dan distribusi tenaga kesehatan masih rendah

Akar masalah mutu dan distribusi tenaga kesehatan masih rendah disebabkan karena serabut masalah a) Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan belum sesuai standar; dan b) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan masih kurang.

3. Akar masalah kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih rendah

Akar masalah kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih rendah disebabkan karena beberapa serabut masalah yaitu: a) Kualitas pelayanan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) masih rendah; b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga masih rendah; c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) masih rendah; serta d) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga masih rendah

4. Akar masalah kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masih rendah

Akar masalah kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan masih rendah disebabkan karena serabut masalah: a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan serta Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor masih rendah; b) Pelaksanaan gerakan hidup sehat dalam rangka upaya promotif dan preventif masih rendah; dan c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) masih rendah

Identifikasi permasalahan-permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah dan Serabut Masalah Dinas Kesehatan

Inti Masalah Dinas Kesehatan	Masalah		Akar Masalah		Serabut Masalah
Masih rendahnya derajat kesehatan Masyarakat	Kualitas Kesehatan Keluarga masih rendah	1.	Kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat masih rendah	1.1	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang
				1.2	Pemenuhan layanan kesehatan masih rendah
				1.3	Mutu pelayanan dan tatakelola di fasilitas kesehatan masih rendah
				1.4	Penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi masih rendah
		2.	Mutu dan distribusi tenaga kesehatan masih rendah	2.1	Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan belum sesuai standar
				2.2	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan masih kurang
		3.	Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih rendah	3.1	Kualitas pelayanan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) masih rendah
				3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga masih rendah
				3.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) masih rendah
				3.4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga masih rendah

Inti Masalah Dinas Kesehatan	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		4. Kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan masih rendah	4.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan serta Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor masih rendah
			4.2 Pelaksanaan gerakan hidup sehat dalam rangka upaya promotif dan preventif masih rendah
			4.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) masih rendah

Sumber : Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

2.2.2 Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka di masa mendatang. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis diperoleh isu-isu strategis pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Isu Strategis Dinas Kesehatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Stategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ada regulasi, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan SOP pelayanan kesehatan 2. Tersediia sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 3. Tersedia tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 4. Ada sistem informasi rujukan yang terintegrasi 5. Ada inovasi pelayanan kesehatan 6. Tersedia standar pelayanan minimal bidang kesehatan 7. Ada insentif di bidang kesehatan 8. Tersedia tenaga kesehatan yang terlatih	Masih rendahnya derajat kesehatan Masyarakat	1. Aksesabilitas kesehatan yang sulit karena buruknya infrastruktur jalan 2. Upaya promosi kesehatan di masyarakat belum maksimal 3. Belum optimalnya supervisi suportif terhadap Puskesmas dan jaringan 4. Akses air minum terbatas, kondisi rumah, jamban keluarga serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga kurang higienis 5. Rendahnya akses	1. Bencana alam dan perubahan iklim 2. Pertumbuhan penduduk yang pesat 3. Masuknya bahan makanan, minuman, obat yang tidak aman	4. Koordinasi terhadap implementasi berbagai regulasi dan kebijakan kesehatan belum optimal ditingkat Kementerian/Lembaga 5. Beberapa aplikasi yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga bidang kesehatan tidak terintegrasi 6. Beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tidak ada keberlanjutan 7. Kebijakan penganggaran Kementerian Kesehatan belum sesuai spesifikasi dan prioritas kebutuhan daerah 8. Keterbatasan terhadap infrastruktur kesehatan 9. Keterbatasan pembiayaan	1. Belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP pelayanan kesehatan 2. Perkembangan teknologi (akses informasi digital yang mudah untuk mendukung perkembangan kesehatan) 3. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, CSR, dan Sumber dana lainnya 4. Adanya kelompok masyarakat peduli kesehatan, organisasi profesi, dan lintas sektor yang mendukung pelayanan bidang kesehatan	1. Ada regulasi, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan SOP pelayanan kesehatan 2. Tersediia sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 3. Tersedia tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 4. Ada sistem informasi rujukan yang terintegrasi 5. Ada inovasi pelayanan kesehatan 6. Tersedia standar pelayanan minimal bidang kesehatan 7. Ada insentif di bidang kesehatan

		sanitasi yang layak 6. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan belum sesuai standar 7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan ODDP 8. Kasus rabies masih tinggi 9. Distribusi tenaga kesehatan belum merata 10. Terbatasnya tenaga medis 11. Keberlanjutan penanganan stunting di tingkat rumah tangga belum maksimal 12. Tingginya harga peralatan kesehatan 13. Penurunan kualitas lingkungan hidup 14. Resistensi antibiotik 15. Privasi dan keamanan informasi kesehatan 16. Jumlah balita penderita stunting Kabupaten Sikka		jaminan kesehatan bagi masyarakat 10. Manajemen puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah belum berbasis BLUD 11. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang masih rendah 12. Rendahnya penerapan PHBS 13. Masih rendahnya status gizi masyarakat 14. Masih rendah nya kualitas hidup lansia 15. Masih rendahnya kualitas hidup difabel 16. Meningkatnya masalah kesehatan jiwa 17. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru (New Emerging Disease) dan penyakit-penyakit infeksi lama yang muncul kembali (Re-Emerging Disease) 18. Peningkatan daya saing SDM secara nasional yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam meningkatkan aksesibilitas kesehatan 19. Regulasi dan kebijakan nasional bidang kesehatan 20. Adanya dukungan anggaran untuk	5. Adanya fasilitas kesehatan swasta 6. Ada komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam bidang kesehatan 7. Tersedia Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)	8. Tersedia tenaga kesehatan yang terlatih
--	--	--	--	---	--	---

1

				peningkatan pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dari Kementerian Kesehatan 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bersinergi dengan kebijakan Nasional Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 untuk Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur 23. Highlight intervensi kewilayahan dari nasional untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dan penanganan stunting dan perbaikan gizi		
--	--	--	--	--	--	--

1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka yang tergambar didalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri"**. Perumusan Visi ini disusun secara sistematis dengan berbagai pendekatan dan merepresentasikan harapan pembangunan daerah dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka yang terpilih untuk lima tahun ke depan. Visi RPJMD ini diharapkan mampu mengonsolidasikan potensi dan sumber daya daerah secara optimal untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam mencapai visi pembangunan dalam lima tahun mendatang, disusun Misi Kabupaten Sikka dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, inovatif dan berkarakter sosial
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, dan berdaya saing
3. mewujudkan infrastruktur antar wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Kolaboratif dan Bebas KKN

Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang mengurus urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan memiliki tugas mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terutama berfokus pada Misi yang pertama yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, inovatif dan berkarakter sosial. Untuk itu Dinas Kesehatan menetapkan Tujuan yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2024-2026. Tujuan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah di bidang kesehatan secara keseluruhan. Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kabupaten

Sikka tahun 2025 – 2029, serta telaah terhadap tugas, fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, maka tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah **Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan** dengan indikatornya adalah Usia Harapan Hidup (UHH).

3.2. Sasaran

Tujuan Dinas Kesehatan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Untuk pencapaian tujuan Dinas Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga** dengan indikator capaian Sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Angka Kematian Balita
3. Prevalensi Stunting
4. Cakupan Kepesertaan JKN
5. Angka keberhasilan pengobatan TB
6. Persentase Hipertensi dalam pengendalian
7. Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis
8. Cakupan imunisasi bayi lengkap

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2025 – 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline data	Target Indikator Kinerja						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan		Usia Harapan Hidup	74,24	74,48	74,72	74,96	75,20	75,44	75,68	
		Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga									
			1. Jumlah Kematian Ibu	2	2	2	2	2	2	2	
			2. Angka Kematian Balita	13.5	13.5	13.5	13.1	12.5	11.9	11.3	
			3. Prevalensi Stunting	32.28	31.26	30.24	29.22	28.2	27.18	26.16	
			4. Cakupan Kepesertaan JKN	98.33	98.38	98.43	98.48	98.53	98.58	98.63	
			5. Angka keberhasilan pengobatan TB	85	90	90	90	90	90	90	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline data	Target Indikator Kinerja						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			6. Persentase Hipertensi dalam pengendalian	5.9	20	25	30	35	40	45	
			7. Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	0	36	46	55	61	70	79	
			8. Cakupan imunisasi bayi lengkap	53.9	80	85	90	93	95	100	

1

3.3. Strategi

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, stratagi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Transformasi Sistem Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi, Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan Aksesibilitas Kesehatan, Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor, Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunitas, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Berbasis Surveilans, Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial,	Meningkatnya Transformasi Sistem Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi, Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan Aksesibilitas Kesehatan, Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor, Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunitas, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Berbasis Surveilans, Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial,	Meningkatnya Transformasi Sistem Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi, Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan Aksesibilitas Kesehatan, Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor, Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunitas, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Berbasis Surveilans, Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial, Penguatan Sistem Pengawasan	Meningkatnya Transformasi Sistem Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi, Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan Aksesibilitas Kesehatan, Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor, Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunitas, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya Transformasi Sistem Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi, Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan Aksesibilitas Kesehatan, Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor, Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunitas, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif, Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level	Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif, Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level	Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif, Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level	Berbasis Surveilans, Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial, Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif, Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level	Berbasis Surveilans, Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial, Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif, Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level
---	---	---	---	---

Penjelasan masing-masing strategi pembangunan pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Transformasi Sistem Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi

Transformasi sistem kesehatan merupakan langkah strategis yang sedang digulirkan saat ini oleh Kementerian Kesehatan dengan bertopang pada 6 pilar transformasi sistem kesehatan yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan. Strategi ini diarahkan pula untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka melalui modernisasi layanan yang efisien, responsif, dan terintegrasi. Strategi ini mencakup penguatan layanan primer dan rujukan yang terintegrasi berbasis teknologi, dengan membangun sistem informasi kesehatan yang terkoneksi antara puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas rujukan lainnya untuk mempercepat akses dan akurasi pelayanan.

Transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi kesehatan mencakup berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Bentuk-bentuk layanan teknologi kesehatan antara lain telemedicine, rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan mobile serta penggunaan big data dan analitik. Dinas Kesehatan perlu memperhatikan pengembangan inovasi layanan kesehatan yang ramah digital dan kolaboratif, yang melibatkan masyarakat, tenaga medis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sistem layanan yang inklusif dan mudah diakses.

2) Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan

Peningkatan kompetensi dan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang merata merupakan salah satu upaya kunci dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh, berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan daerah melalui program pelatihan berkelanjutan, peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga medis dan paramedis, kredensialing serta penguatan soft skills seperti komunikasi, empati, dan manajemen layanan kesehatan melalui supervisi berkelanjutan. Dinas Kesehatan memfasilitasi peningkatan jenjang keterampilan dan keahlian tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, pemerataan tenaga kesehatan dilakukan ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, dengan penataan pola distribusi yang berbasis kebutuhan dan didukung oleh pemberian insentif dan penyediaan logistik yang memadai guna mendorong keberadaan tenaga kesehatan secara adil dan berkelanjutan. Upaya pemerataan distribusi tenaga dimulai dengan penataan rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan yang di wilayah Kabupaten Sikka yang didasarkan pada perhitungan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Melalui kombinasi antara peningkatan kapasitas, pemerataan distribusi, dan penguatan fungsi edukatif, strategi ini diharapkan mampu menciptakan sistem layanan kesehatan yang tidak hanya reaktif terhadap penyakit, tetapi juga proaktif dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

3) Peningkatan infrastruktur dan Aksesibilitas Kesehatan

Strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sikka, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Strategi ini mencakup penguatan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar melalui pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas, Pustu, serta fasilitas kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan medis sesuai standar. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan mendorong pembangunan gedung Puskesmas maupun Pustu dengan prototipe yang sesuai dengan integrasi layanan primer. Selain itu upaya pemerataan infrastruktur kesehatan juga dilakukan dengan membangun rumah sakit pada wilayah terpencil untuk menjadi pusat rujukan dari Puskesmas di daerah sekitar. Termasuk dalam strategi ini adalah pembangunan rumah sakit pratama Tipe D di wilayah Kecamatan Doreng yang merupakan salah satu kecamatan terpencil di wilayah selatan Kabupaten Sikka. Rumah sakit ini diharapkan mampu mendukung proses rujukan pasien dari Puskesmas Habibola, Puskesmas Bola dan Puskesmas Mapitara serta wilayah sekitarnya.

Dinas Kesehatan membutuhkan kerjasama lintas sektor untuk memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan aksesabilitas pelayanan kesehatan seperti jalan penghubung antarwilayah, transportasi medis, serta jaringan komunikasi yang mendukung mobilitas tenaga kesehatan dan kelancaran pelayanan, terutama di daerah kepulauan dan sulit dijangkau. Guna mempercepat hal tersebut, strategi ini juga mendorong pemanfaatan pendanaan multisumber, termasuk dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, CSR, dan kemitraan swasta, sehingga pembangunan infrastruktur kesehatan tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Sikka berkomitmen mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berdaya jangkauan tinggi, sebagai fondasi bagi kehidupan masyarakat yang sehat secara mandiri dan berkelanjutan.

4) Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor

Strategi ini merupakan langkah prioritas dalam memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dalam menghadapi masalah kesehatan ibu dan anak tantangan gizi buruk dan tingginya angka

kematian yang berhubungan dengan kondisi kesehatan ibu, bayi, dan anak. Strategi ini mencakup percepatan penanganan mortalitas dan rendahnya gizi rumah tangga, melalui peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan gizi keluarga, serta intervensi langsung terhadap rumah tangga berisiko tinggi. Selain itu, dilakukan akselerasi penurunan stunting dan perbaikan gizi anak, dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), pemberian makanan tambahan bergizi, pemantauan pertumbuhan anak secara berkala, serta penguatan kapasitas kader Posyandu dan tenaga gizi.

Strategi ini juga menekankan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, seperti integrasi data gizi, kesehatan, dan sosial ekonomi untuk targeting yang tepat sasaran, serta keterlibatan aktif dinas terkait seperti pendidikan, sosial, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan penanganan gizi buruk dan stunting secara terpadu, melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh secara kolaboratif, sistematis, dan berbasis bukti.

5) Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunitas

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup revitalisasi program promosi kesehatan dan edukasi masyarakat, dengan memperkuat peran tenaga promosi kesehatan, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang kontekstual dan mudah dipahami oleh semua lapisan. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, pendekatan berbasis budaya lokal, serta kegiatan langsung di tingkat desa dan dusun untuk menjangkau kelompok rentan dan terpencil.

Selain itu, strategi ini mendorong sinergi lintas sektor untuk promosi kesehatan, dengan melibatkan instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan kelompok pemuda dalam menyusun dan melaksanakan program edukasi kesehatan secara terpadu. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan terjadinya perubahan perilaku hidup sehat secara kolektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan kesehatan.

Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka memperkuat pilar preventif dan promotif dalam sistem kesehatan, guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan mandiri.

6) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Berbasis Surveilans

Strategi ini merupakan komponen penting dalam memperkuat sistem ketahanan kesehatan masyarakat Kabupaten Sikka agar mampu merespons ancaman penyakit secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengendalian penyakit menular dan rabies berbasis wilayah, dengan pendekatan spasial yang menyesuaikan karakteristik daerah, termasuk peningkatan cakupan vaksinasi, pelacakan kasus, dan penanganan secara terpadu. Selain itu, dilakukan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan secara sinergis, seperti malaria, TB, dan kusta, melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan.

Strategi ini juga mengedepankan penguatan layanan deteksi dini dan respons cepat terhadap penyakit menular, melalui pengembangan sistem surveilans aktif, pelatihan tenaga kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan analisis kasus secara real-time. Di sisi lain, dilakukan mitigasi penyakit menular dan peningkatan ketahanan terhadap krisis kesehatan, dengan menyiapkan protokol tanggap darurat, logistik kesehatan, dan komunikasi risiko untuk menghadapi potensi wabah atau kedaruratan kesehatan. Melalui pendekatan berbasis data dan wilayah serta keterlibatan multisektor, strategi ini memperkuat upaya preventif dan responsif Kabupaten Sikka dalam menurunkan beban penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

7) Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial

Strategi ini merupakan bagian penting dari upaya holistik untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dalam aspek kesehatan mental dan kesejahteraan kelompok rentan. Strategi ini mencakup peningkatan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial, melalui penyediaan layanan psikososial di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelatihan tenaga kesehatan dalam deteksi dan penanganan gangguan jiwa, serta penguatan program rehabilitasi berbasis komunitas bagi individu

dengan gangguan kejiwaan. Di samping itu, dilakukan penguatan perlindungan dan layanan bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan penyintas bencana, dengan mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan perlindungan sosial secara kolaboratif. Layanan ini meliputi akses terhadap bantuan sosial, konseling, pendampingan, dan rujukan medis maupun sosial secara terkoordinasi antar perangkat daerah dan mitra non-pemerintah.

Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen untuk menghadirkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terjangkau dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat solidaritas sosial sebagai fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

8) Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif

Strategi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian risiko yang berasal dari makanan, obat, dan produk konsumsi lainnya secara menyeluruh dan lintas sektor. Strategi ini mencakup penguatan layanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner terintegrasi, guna mencegah zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia, termasuk pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk hewani yang layak dan aman. Selain itu, dilakukan penguatan ketahanan pangan dan sistem pengawasan obat serta produk konsumsi, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian mutu, memperketat pengawasan distribusi pangan dan obat-obatan, serta mendorong literasi konsumen terhadap keamanan produk yang dikonsumsi.

Strategi ini juga melibatkan kerja sama lintas perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam sistem pengawasan terpadu, termasuk pelaporan masyarakat, inspeksi rutin, dan edukasi publik. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari paparan produk berisiko dan membangun sistem kesehatan yang proaktif, preventif, dan berbasis kolaborasi dalam menjamin keselamatan konsumen.

9) Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level

Strategi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Strategi ini mencakup sinkronisasi lintas sistem dan koordinasi kebijakan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, guna menghindari tumpang tindih program, memperkuat integrasi perencanaan, serta memastikan implementasi kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal di Kabupaten Sikka.

Tatakelola kesehatan saat ini diseleraskan dengan upaya mendorong Puskesmas menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), akreditasi fasilitas kesehatan pada tingkat paripurna serta menerapkan enam pilar transformasi pelayanan kesehatan disetiap level fasilitas kesehatan.

Disamping itu, dilakukan penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan, baik di fasilitas layanan primer maupun rujukan, melalui peningkatan kapasitas manajemen kesehatan, supervisi berkala, serta evaluasi kinerja berbasis indikator mutu pelayanan. Strategi ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan data yang valid dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program kesehatan lintas sektor. Dengan tata kelola yang solid dan kebijakan yang sinkron, Kabupaten Sikka dapat membangun sistem kesehatan yang terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian Strategi Dinas Kesehatan, maka ditetapkan pentahpan arah kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan transformasi layanan kesehatan, menguatkan kapasitas SDM Kesehatan serta tatakelola fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat	Meningkatkan transformasi layanan kesehatan, menguatkan kapasitas SDM Kesehatan, promosi kesehatan, peningklatan infrastuktur serta tatakelola fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat	Meningkatkan transformasi layanan kesehatan, promosi kesehatan, peningkatan infrastruktur serta tatakelola fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat	Meningkatkan transformasi layanan kesehatan, peningkatan infrastruktur serta promosi kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat	Meningkatkan transformasi layanan kesehatan, dan promosi kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, ditetapkan 5 (lima) program yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; dengan indikator programnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase Kecamatan dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar
 - 2) Angka Kematian Bayi
 - 3) Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat
 - 4) Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun
 - 5) Prevalensi Obesitas > 18 tahun
 - 6) Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
 - 7) Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional
 - 8) Persentase faskes terakreditasi Paripurna
 - 9) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dengan indikator programnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi
 - 2) Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
 - 3) Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dengan indikator programnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan
 - 2) Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan
4. Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan; dengan indikator programnya adalah Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku hidup sehat
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dengan indikator programnya adalah:
 - 1) Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Nilai SAKIP Peringkat Daerah

Tabel 4.1
Program Dinas Kesehatan
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					173.352.642.711		180.597.530.737		181.809.597.291		182.791.363.772		184.043.171.518	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.871.336.240		75.965.724.895		77.076.529.380		78.203.995.930		79.348.374.480	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kesehatan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	74.871.336.240	100	75.965.724.895	100	77.076.529.380	100	78.203.995.930	100	79.348.374.480	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	51,25	79,50	79,70		79,90		80,10		80,20		80,30		Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					93.713.141.163		99.765.327.846		99.765.327.846		99.515.327.846		99.515.328.113	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat					93.713.141.163		99.765.327.846		99.765.327.846		99.515.327.846		99.515.328.113	Dinas Kesehatan
	Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	0	85	87		89		91		92		93		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,5	11,5	11,5		10,97		10,46		9,96		9		Dinas Kesehatan

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	50	55	60		65		70		75		80		Dinas Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,01	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0,7	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	0	77	78		79		79,5		80		81		Dinas Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	50	55		60		65		70		75		Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	20	20	30		30		62,5		75,5		75,5		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	43,5	90	90		90		90		90		90		Dinas Kesehatan
	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	421	421	421		421		421		421		421		Dinas Kesehatan
	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	33	33	33		33		33		33		33		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	71	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	79	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	82	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	78	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)	48	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	105	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	19	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)	34	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	52	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberculosis (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Positiftity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)	0	0,9	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		Dinas Kesehatan
	Positiftity rate Malaria (%)	1,39	4,9	4,9		4,9		4,9		4,9		4,9		Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.277.089.608		3.375.402.296		3.476.664.365		3.580.964.296		3.688.393.225	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	24	17	22	3.277.089.608	30	3.375.402.296	40	3.476.664.365	50	3.580.964.296	60	3.688.393.225	Dinas Kesehatan

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)	8	5,3	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5		Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					427.329.900		427.329.900		427.329.900		427.329.900		427.329.900	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	70	73	427.329.900	75	427.329.900	78	427.329.900	80	427.329.900	85	427.329.900	Dinas Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	0	15	19		21		23		25		27		Dinas Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					173.352.642.711.00		180.597.530.737		181.809.597.291		182.791.363.772		184.043.171.518	

4.2. Uraian Kegiatan

Program yang sudah ditetapkan dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan kedalam Kegiatan-Kegiatan. Terdapat 21 Kegiatan pada 5 Program masing-masing sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; terdiri dari 4 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; terdiri dari 2 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; terdiri dari 4 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 3) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 4) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
4. Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan; terdiri dari 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; terdiri dari 8 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Jumlah Kematian Ibu (Orang)		
					Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
					Prevalensi Stunting (%)		
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)		
					Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)		
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat			Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberculosis (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Positivity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Positivity rate Malaria (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan pelayanan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kesehatan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

1

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk menyelesaikan masalah secara lebih spesifik dalam mendukung capaian Kegiatan, Program, Sasaran dan Tujuan Dinas Kesehatan selama 5 tahun mendatang, Dinas Kesehatan menyelenggarakan 96 Sub Kegiatan dari 21 Kegiatan dan 5 Program yang telah ditetapkan. Adapun kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				173.352.642.711		180.597.530.737		181.809.597.291		182.791.363.772		184.043.171.518		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				74.871.336.240		75.965.724.895		77.076.529.380		78.203.995.930		79.348.374.480		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kesehatan				74.871.336.240		75.965.724.895		77.076.529.380		78.203.995.930		79.348.374.480		
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	51,25	79,70		80,10		80,10		80,20		80,30			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				170.142.000		205.142.000		205.142.000		205.142.000		205.142.000		
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	170.142.000	4	205.142.000	4	205.142.000	4	205.142.000	4	205.142.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12			78		78		78		78			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		0	78	35.000.000	78	35.000.000	78	35.000.000	78	35.000.000		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				71.746.000		71.746.000		71.746.000		71.746.000		71.746.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	71.746.000	12	71.746.000	12	71.746.000	12	71.746.000	12	71.746.000		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				98.396.000		98.396.000		98.396.000		98.396.000		98.396.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	98.396.000	4	98.396.000	4	98.396.000	4	98.396.000	4	98.396.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				73.455.673.631		73.455.673.631		75.575.866.771		76.703.333.321		77.847.711.871		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.408	1.700	73.455.673.631	1.750	73.455.673.631	1.800	75.575.866.771	1.850	76.703.333.321	1.900	77.847.711.871		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				72.959.243.631		72.959.243.631		75.079.436.771		76.206.903.321		77.351.281.871		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.408	1.700	72.959.243.631	1.750	72.959.243.631	1.800	75.079.436.771	1.850	76.206.903.321	1.900	77.351.281.871		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				496.430.000		496.430.000		496.430.000		496.430.000		496.430.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	14	496.430.000	14	496.430.000	14	496.430.000	14	496.430.000	14	496.430.000		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		59.388.655		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	4	59.388.655	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		59.388.655		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	4	59.388.655	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				47.971.000		47.971.000		47.971.000		47.971.000		47.971.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	47.971.000	4	47.971.000	4	47.971.000	4	47.971.000	4	47.971.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				36.768.000		36.768.000		36.768.000		36.768.000		36.768.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	36.768.000	12	36.768.000	12	36.768.000	12	36.768.000	12	36.768.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11.203.000		11.203.000		11.203.000		11.203.000		11.203.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	11.203.000	4	11.203.000	4	11.203.000	4	11.203.000	4	11.203.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				293.895.400		293.895.400		293.895.400		293.895.400		293.895.400		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	293.895.400	12	293.895.400	12	293.895.400	12	293.895.400	12	293.895.400		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.299.200		5.299.200		5.299.200		5.299.200		5.299.200		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.299.200	1	5.299.200	1	5.299.200	1	5.299.200	1	5.299.200		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.946.200		69.946.200		69.946.200		69.946.200		69.946.200		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	69.946.200	1	69.946.200	1	69.946.200	1	69.946.200	1	69.946.200		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	38.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.650.000		175.650.000		175.650.000		175.650.000		175.650.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	175.650.000	12	175.650.000	12	175.650.000	12	175.650.000	12	175.650.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.493.500		130.493.500		30.493.500		30.493.500		30.493.500		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	90	30.493.500	6	130.493.500	6	30.493.500	6	30.493.500	6	30.493.500		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				17.023.900		17.023.900		17.023.900		17.023.900		17.023.900		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	90	17.023.900	6	17.023.900	6	17.023.900	6	17.023.900	6	17.023.900		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.469.600		13.469.600		13.469.600		13.469.600		13.469.600		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2	13.469.600	3	13.469.600	3	13.469.600	3	13.469.600	3	13.469.600		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung				0		100.000.000		0		0		0		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				504.835.609		504.835.609		504.835.609		504.835.609		504.835.609		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	504.835.609	12	504.835.609	12	504.835.609	12	504.835.609	12	504.835.609		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	6		6		6		6		6			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.033.669		138.033.669		138.033.669		138.033.669		138.033.669		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	138.033.669	12	138.033.669	12	138.033.669	12	138.033.669	12	138.033.669		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.350.000		5.350.000		5.350.000		5.350.000		5.350.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	6	5.350.000	6	5.350.000	6	5.350.000	6	5.350.000	6	5.350.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Laporan)													
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				361.451.940		361.451.940		361.451.940		361.451.940		361.451.940		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	361.451.940	12	361.451.940	12	361.451.940	12	361.451.940	12	361.451.940		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				368.325.100		1.268.325.100		368.325.100		368.325.100		368.325.100		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	44	368.325.100	48	1.268.325.100	48	368.325.100	48	368.325.100	48	368.325.100		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit)	0	0		1		0		0		0			
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				368.325.100		368.325.100		368.325.100		368.325.100		368.325.100		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	44	368.325.100	48	368.325.100	48	368.325.100	48	368.325.100	48	368.325.100		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		900.000.000		0		0		0		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	900.000.000	0	0	0	0	0	0		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				93.713.141.163		99.765.327.846		99.765.327.846		99.515.327.846		99.515.328.113		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				93.713.141.163		99.765.327.846		99.765.327.846		99.515.327.846		99.515.328.113	1.02.0.00.0.00.01.00 01 - PUSKESMAS BOGANATAR	
													1.02.0.00.0.00.01.00 02 - PUSKESMAS WATUBAING	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - PUSKESMAS WAIGETE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - PUSKESMAS TANARAWA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - PUSKESMAS HEWOKLOANG	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - PUSKESMAS BERU	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - PUSKESMAS KOPETA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - PUSKESMAS WOLOMARANG	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - PUSKESMAS MAGEPANDA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - PUSKESMAS NELLE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - PUSKESMAS KOTING	

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - PUSKESMAS NITA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - PUSKESMAS NANGA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - PUSKESMAS PAGA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - PUSKESMAS LEKEBAI	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - PUSKESMAS WOLOFEO	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - PUSKESMAS FEONDARI	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - PUSKESMAS BOLA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - PUSKESMAS HABIBOLA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - PUSKESMAS MAPITARA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - PUSKESMAS TELUK	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - PUSKESMAS PALUE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - PUSKESMAS TUANGGEO	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - PUSKESMAS WAIPARE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - PUSKESMAS KEWAPANTE	

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	0	87		89		91		92		93		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,5	11,5		10,97		10,46		9,96		9			
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	50	60		65		70		75		80			
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,01	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4			
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0,7	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4			
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	0	78		79		79,5		80		81			
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	55		60		65		70		75			
	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	20	30		30		62,5		75,5		75,5			
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	43,5	90		90		90		90		90			
	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	421	421		421		421		421		421			
	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	33	33		33		33		33		33			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	71	100		100		100		100		100			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	79	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	82	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	78	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	98	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)	48	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	105	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	19	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)	34	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	52	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberculosis (%)	107	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)	98	100		100		100		100		100			
	Positivity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)	0	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Positifity rate Malaria (%)	1,39	4,9		4,9		4,9		4,9		4,9			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				13.917.210.327		19.917.210.327		19.246.017.010		14.261.017.010		14.161.017.277		
Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	0	0	13.917.210.327	0	19.917.210.327	25.000	19.246.017.010	0	14.261.017.010	0	14.161.017.277		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	0		1		1		0		0			
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	0		0		1		1		0			
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	2		2		2		2		2			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	0	30		30		30		40		50			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	150		150		150		200		200			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	75	100		100		100		100		100			
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	150	200		240		260		280		300			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	10	10		10		10		10		10			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0		6.000.000.000		5.303.806.683		0		0		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	0	0	1	6.000.000.000	1	5.303.806.683	0	0	0	0		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				39.998.700		39.998.700		39.998.700		39.998.700		39.998.700		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	2	39.998.700	2	39.998.700	2	39.998.700	2	39.998.700	2	39.998.700		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				557.814.616		557.814.616		557.814.616		557.814.616		557.814.616		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	10	10	557.814.616	10	557.814.616	10	557.814.616	10	557.814.616	10	557.814.616		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0		0		15.000.000		15.000.000		0		
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	0	0		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				873.919.900		873.919.900		873.919.900		1.202.726.583		1.117.726.850		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	25	25	873.919.900	25	873.919.900	25	873.919.900	25	1.202.726.583	25	1.117.726.850		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3.474.870		3.474.870		3.474.870		3.474.870		3.474.870		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	3.474.870	1	3.474.870	1	3.474.870	1	3.474.870	1	3.474.870		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				42.209.070		42.209.070		42.209.070		42.209.070		42.209.070		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	2	42.209.070	2	42.209.070	2	42.209.070	2	42.209.070	2	42.209.070		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				328.063.802		328.063.802		328.063.802		328.063.802		328.063.802		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	75	100	328.063.802	100	328.063.802	100	328.063.802	100	328.063.802	100	328.063.802		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				178.282.000		178.282.000		178.282.000		178.282.000		178.282.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	150	178.282.000	150	178.282.000	150	178.282.000	200	178.282.000	200	178.282.000		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				11.227.236.569		11.227.236.569		11.227.236.569		11.227.236.569		11.227.236.569		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	3	11.227.236.569	3	11.227.236.569	3	11.227.236.569	3	11.227.236.569	3	11.227.236.569		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				0		0		10.000.000		0		0		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	0	0	0	0	0	25.000	10.000.000	0	0	0	0		
1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)				269.141.000		269.141.000		269.141.000		269.141.000		269.141.000		
Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan	0	30	269.141.000	30	269.141.000	30	269.141.000	40	269.141.000	50	269.141.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengembangan (Layanan)													
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				297.069.800		297.069.800		297.069.800		297.069.800		297.069.800		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	150	200	297.069.800	240	297.069.800	260	297.069.800	280	297.069.800	300	297.069.800		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				79.431.122.636		79.483.309.319		79.629.502.636		84.864.502.636		84.964.502.636		
Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	33	0	79.431.122.636	0	79.483.309.319	0	79.629.502.636	7	84.864.502.636	20	84.964.502.636		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57.922	60.818		63.859		67.052		70.405		73.925			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.093	16.898		17.743		18.630		19.561		20.539			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.774	3.963		4.161		4.369		4.587		4.817			
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	0		0		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	0	0		0		3		4		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0	0		0		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	12	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	10		12		12		12		12			
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	0		0		10		20		30			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	4	5		6		7		8		9			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	20	0		0		250		0		0			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	211.192	211.405		211.618		211.831		212.044		212.257			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	34.568	36.296		38.111		40.017		42.018		44.119			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7.031	10.220		10.629		11.054		11.494		11.952			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.455	1.305		1.357		1.411		1.468		1.526			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	794	1.094		1.119		1.144		1.169		1.194			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	42	84		50		50		50		50			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5.040	5.446		4.713		4.917		3.798		3.495			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6.642	6.466		7.115		7.827		8.609		9.470			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.433	560		485		431		390		359			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	750	200		200		200		200		200			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	518	658		728		798		868		938			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)													
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.143	4.350		4.568		4.796		5.036		5.288			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.086	4.290		4.505		4.730		4.967		5.215			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0	0		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	0		0		0		12		12			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.141.201.100		2.141.201.100		2.141.201.100		2.141.201.100		2.141.201.100		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.143	4.350	2.141.201.100	4.568	2.141.201.100	4.796	2.141.201.100	5.036	2.141.201.100	5.288	2.141.201.100		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				229.595.694		229.595.694		229.595.694		229.595.694		229.595.694		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.086	4.290	229.595.694	4.505	229.595.694	4.730	229.595.694	4.967	229.595.694	5.215	229.595.694		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				121.968.000		121.968.000		121.968.000		121.968.000		121.968.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.774	3.963	121.968.000	4.161	121.968.000	4.369	121.968.000	4.587	121.968.000	4.817	121.968.000		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.093	16.898	25.500.000	17.743	25.500.000	18.630	25.500.000	19.561	25.500.000	20.539	25.500.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				1.145.480.500		1.145.480.500		1.145.480.500		1.145.480.500		1.145.480.500		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57.922	60.818	1.145.480.500	63.859	1.145.480.500	67.052	1.145.480.500	70.405	1.145.480.500	73.925	1.145.480.500		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				41.540.200		41.540.200		41.540.200		41.540.200		41.540.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	211.192	211.405	41.540.200	211.618	41.540.200	211.831	41.540.200	212.044	41.540.200	212.257	41.540.200		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				106.020.000		106.020.000		106.020.000		106.020.000		106.020.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	34.568	36.296	106.020.000	38.111	106.020.000	40.017	106.020.000	42.018	106.020.000	44.119	106.020.000		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				14.561.600		14.561.600		14.561.600		14.561.600		14.561.600		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7.031	10.220	14.561.600	10.629	14.561.600	11.054	14.561.600	11.494	14.561.600	11.952	14.561.600		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				5.348.400		5.348.400		5.348.400		5.348.400		5.348.400		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.455	1.305	5.348.400	1.357	5.348.400	1.411	5.348.400	1.468	5.348.400	1.526	5.348.400		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				605.340.400		605.340.400		605.340.400		605.340.400		605.340.400		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	794	1.094	605.340.400	1.119	605.340.400	1.144	605.340.400	1.169	605.340.400	1.194	605.340.400		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				424.390.000		424.390.000		424.390.000		424.390.000		424.390.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5.040	5.446	424.390.000	4.713	424.390.000	4.917	424.390.000	3.798	424.390.000	3.495	424.390.000		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				30.820.000		30.820.000		30.820.000		30.820.000		30.820.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6.642	6.466	30.820.000	7.115	30.820.000	7.827	30.820.000	8.609	30.820.000	9.470	30.820.000		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				13.550.000		13.550.000		13.550.000		13.550.000		13.550.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	12	12	13.550.000	12	13.550.000	12	13.550.000	12	13.550.000	12	13.550.000		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sesuai Standar (Dokumen)													
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9.420.440.800		9.420.440.800		9.420.440.800		9.420.440.800		9.420.440.800		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12	9.420.440.800	12	9.420.440.800	12	9.420.440.800	12	9.420.440.800	12	9.420.440.800		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				517.660.000		517.660.000		517.660.000		517.660.000		517.660.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12	517.660.000	12	517.660.000	12	517.660.000	12	517.660.000	12	517.660.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				584.003.065		584.003.065		584.003.065		584.003.065		584.003.065		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12	584.003.065	12	584.003.065	12	584.003.065	12	584.003.065	12	584.003.065		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				438.142.900		438.142.900		438.142.900		438.142.900		438.142.900		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	12	438.142.900	12	438.142.900	12	438.142.900	12	438.142.900	12	438.142.900		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	12	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1.452.231.500		1.452.231.500		1.452.231.500		1.452.231.500		1.452.231.500		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	1.452.231.500	12	1.452.231.500	12	1.452.231.500	12	1.452.231.500	12	1.452.231.500		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				245.690.000		245.690.000		245.690.000		245.690.000		245.690.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	750	200	245.690.000	200	245.690.000	200	245.690.000	200	245.690.000	200	245.690.000		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				0		0		15.000.000		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	20	0	0	0	0	250	15.000.000	0	0	0	0		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				19.230.000		19.230.000		19.230.000		19.230.000		19.230.000		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0	12	19.230.000	12	19.230.000	12	19.230.000	12	19.230.000	12	19.230.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3.451.197.050		3.451.197.050		3.451.197.050		3.451.197.050		3.451.197.050		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12	3.451.197.050	12	3.451.197.050	12	3.451.197.050	12	3.451.197.050	12	3.451.197.050		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				43.696.590.760		43.696.590.760		43.696.590.760		43.696.590.760		43.696.590.760		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	43.696.590.760	12	43.696.590.760	12	43.696.590.760	12	43.696.590.760	12	43.696.590.760		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				66.673.800		66.673.800		66.673.800		66.673.800		66.673.800		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	4	5	66.673.800	6	66.673.800	7	66.673.800	8	66.673.800	9	66.673.800		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terseleenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		22.186.683		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk	0	0	0	16	22.186.683	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)													
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		0		5.000.000.000		5.000.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				9.488.489.363		9.488.489.363		9.488.489.363		9.488.489.363		9.488.489.363		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	12	9.488.489.363	12	9.488.489.363	12	9.488.489.363	12	9.488.489.363	12	9.488.489.363		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.678.106.654		1.678.106.654		1.678.106.654		1.678.106.654		1.678.106.654		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	1.678.106.654	12	1.678.106.654	12	1.678.106.654	12	1.678.106.654	12	1.678.106.654		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0		0		0		250.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	33	0	0	0	0	0	0	7	250.000.000	20	350.000.000		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3.920.000		3.920.000		3.920.000		3.920.000		3.920.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12	3.920.000	12	3.920.000	12	3.920.000	12	3.920.000	12	3.920.000		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0		0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	0	0	0	0	0	3	15.000.000	4	15.000.000	5	15.000.000		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				14.280.000		14.280.000		14.280.000		14.280.000		14.280.000		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	14.280.000	1	14.280.000	1	14.280.000	1	14.280.000	1	14.280.000		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				66.940.000		66.940.000		66.940.000		66.940.000		66.940.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.433	560	66.940.000	485	66.940.000	431	66.940.000	390	66.940.000	359	66.940.000		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				424.540.000		424.540.000		424.540.000		424.540.000		424.540.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	518	658	424.540.000	728	424.540.000	798	424.540.000	868	424.540.000	938	424.540.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)													
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				184.690.000		184.690.000		184.690.000		184.690.000		184.690.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	42	84	184.690.000	50	184.690.000	50	184.690.000	50	184.690.000	50	184.690.000		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				0		0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	0	0	0	0	10	15.000.000	20	15.000.000	30	15.000.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				870.790.000		870.790.000		870.790.000		870.790.000		870.790.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	12	870.790.000	12	870.790.000	12	870.790.000	12	870.790.000	12	870.790.000		
1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	0	0	0	0	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				371.636.050		371.636.050		371.636.050		371.636.050		371.636.050		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	10	371.636.050	12	371.636.050	12	371.636.050	12	371.636.050	12	371.636.050		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				866.360.000		866.360.000		866.360.000		866.360.000		866.360.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12	12	866.360.000	12	866.360.000	12	866.360.000	12	866.360.000	12	866.360.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				637.574.800		637.574.800		637.574.800		637.574.800		637.574.800		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12	637.574.800	12	637.574.800	12	637.574.800	12	637.574.800	12	637.574.800		
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				26.620.000		26.620.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5	5	26.620.000	5	26.620.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				60.579.900		60.579.900		60.579.900		60.579.900		60.579.900		
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	12	12	60.579.900	12	60.579.900	12	60.579.900	12	60.579.900	12	60.579.900		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				60.579.900		60.579.900		60.579.900		60.579.900		60.579.900		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	12	12	60.579.900	12	60.579.900	12	60.579.900	12	60.579.900	12	60.579.900		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan				304.228.300		304.228.300		829.228.300		329.228.300		329.228.300		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25	25	304.228.300	27	304.228.300	27	829.228.300	27	329.228.300	27	329.228.300		
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	0		0		1		1		1			
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	0		0		1		0		0			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				0		0		500.000.000		0		0		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				304.228.300		304.228.300		304.228.300		304.228.300		304.228.300		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25	25	304.228.300	27	304.228.300	27	304.228.300	27	304.228.300	27	304.228.300		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3.277.089.608		3.375.402.296		3.476.664.365		3.580.964.296		3.688.393.225		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	24	22	3.277.089.608	30	3.375.402.296	40	3.476.664.365	50	3.580.964.296	60	3.688.393.225	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS KESEHATAN	
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	0	100		100		100		100		100			
	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)	8	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5			
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				1.855.855.708		1.855.855.708		1.855.855.708		1.855.855.708		1.855.855.708		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	4	1.855.855.708	4	1.855.855.708	4	1.855.855.708	4	1.855.855.708	4	1.855.855.708		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	675	675		675		675		675		675			
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				1.732.011.608		1.732.011.608		1.732.011.608		1.732.011.608		1.732.011.608		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	675	675	1.732.011.608	675	1.732.011.608	675	1.732.011.608	675	1.732.011.608	675	1.732.011.608		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				123.844.100		123.844.100		123.844.100		123.844.100		123.844.100		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	4	123.844.100	4	123.844.100	4	123.844.100	4	123.844.100	4	123.844.100		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.421.233.900		1.519.546.588		1.620.808.657		1.725.108.588		1.832.537.517		
Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	175	200	1.421.233.900	200	1.519.546.588	200	1.620.808.657	200	1.725.108.588	200	1.832.537.517		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kompetensinya (Orang)													
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.421.233.900		1.519.546.588		1.620.808.657		1.725.108.588		1.832.537.517		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	175	200	1.421.233.900	200	1.519.546.588	200	1.620.808.657	200	1.725.108.588	200	1.832.537.517		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				427.329.900		427.329.900		427.329.900		427.329.900		427.329.900		
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	73	427.329.900	75	427.329.900	78	427.329.900	80	427.329.900	85	427.329.900	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				90.499.500		90.499.500		90.499.500		90.499.500		90.499.500		
Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	45	47	90.499.500	47	90.499.500	48	90.499.500	48	90.499.500	50	90.499.500		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)													
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				90.499.500		90.499.500		90.499.500		90.499.500		90.499.500		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	45	47	90.499.500	47	90.499.500	48	90.499.500	48	90.499.500	50	90.499.500		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				137.911.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	15	30	137.911.500	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)													
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				137.911.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	15	30	137.911.500	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0		37.911.500		37.911.500		37.911.500		37.911.500		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0	0	0	50	37.911.500	55	37.911.500	60	37.911.500	65	37.911.500		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0		37.911.500		37.911.500		37.911.500		37.911.500		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0	0	0	50	37.911.500	55	37.911.500	60	37.911.500	65	37.911.500		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				198.918.900		198.918.900		198.918.900		198.918.900		198.918.900		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	130	145	198.918.900	145	198.918.900	145	198.918.900	145	198.918.900	145	198.918.900		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				198.918.900		198.918.900		198.918.900		198.918.900		198.918.900		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	130	145	198.918.900	145	198.918.900	145	198.918.900	145	198.918.900	145	198.918.900		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		1.063.745.800		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 01 - PUSKESMAS BOGANATAR	
													1.02.0.00.0.00.01.00 02 - PUSKESMAS WATUBAING	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - PUSKESMAS WAIGETE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - PUSKESMAS TANARAWA	

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - PUSKESMAS HEWOKLOANG	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - PUSKESMAS BERU	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - PUSKESMAS KOPETA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - PUSKESMAS WOLOMARANG	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - PUSKESMAS MAGEPANDA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - PUSKESMAS NELLE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - PUSKESMAS KOTING	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - PUSKESMAS NITA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - PUSKESMAS NANGA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - PUSKESMAS PAGA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - PUSKESMAS LEKEBAI	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - PUSKESMAS WOLOFEO	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - PUSKESMAS FEONDARI	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - PUSKESMAS BOLA	

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - PUSKESMAS HABIBOLA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - PUSKESMAS MAPITARA	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - PUSKESMAS TELUK	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - PUSKESMAS PALUE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - PUSKESMAS TUANGGEO	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - PUSKESMAS WAIPARE	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - PUSKESMAS KEWAPANTE	
	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	0	19		21		23		25		27		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				658.030.000		658.030.000		658.030.000		658.030.000		658.030.000		
Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12	12	658.030.000	12	658.030.000	12	658.030.000	12	658.030.000	12	658.030.000		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				658.030.000		658.030.000		658.030.000		658.030.000		658.030.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12	12	658.030.000	12	658.030.000	12	658.030.000	12	658.030.000	12	658.030.000		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		55.715.800		55.715.800		55.715.800		55.715.800		
Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	0	0	12	55.715.800	12	55.715.800	12	55.715.800	12	55.715.800		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0		55.715.800		55.715.800		55.715.800		55.715.800		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	0	0	12	55.715.800	12	55.715.800	12	55.715.800	12	55.715.800		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				405.715.800		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	12	405.715.800	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber				405.715.800		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daya Masyarakat (UKBM)														
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	12	405.715.800	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000		

1

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana tergambar didalam tabel 4.4 berikut ini;

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
			1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	
			1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
			1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
			1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
			1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
			1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 yang pada gilirannnya akan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025-2029. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan kesehatan.

Proses selanjutnya adalah penetapan target yang disusun berdasarkan data yang valid, analisis mendalam, serta partisipasi multipihak serta mempertimbangkan dokumen dari Kementerian Kesehatan yang telah menetapkan indikator dan target pembangunan di bidang kesehatan, sehingga memastikan bahwa target pembangunan yang ditetapkan bersifat realistis dan relevan dengan kondisi serta potensi Kabupaten Sikka. Dengan demikian, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan bukan hanya menjadi bagian dari kerangka formal perencanaan, tetapi merupakan inti dari strategi pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab.

Tabel 4.5 berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN									
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,24	74,48	74,72	74,96	75,2	75,44	75,68	
3.	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	2	2	2	2	2	2	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	51,25	79,5	79,7	79,9	80,1	80,2	80,3	
5.	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	13,5	13,5	13,5	13,1	12,5	11,9	11,3	
6.	Prevalensi Stunting	%	32,28	31,26	30,24	29,22	28,2	27,18	26,16	
7.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,33	98,38	98,43	98,48	98,53	98,58	98,63	
8.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	85	90	90	90	90	90	90	
9.	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	5,9	20	25	30	35	40	45	
10.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	36	46	55	61	70	79	
11.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	53,9	80	85	90	93	95	100	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dinas Kesehatan kabupaten Sikka dalam fungsinya menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap 14 Indikator Kinerja Kunci 12 diantaranya merupakan indikator Standar Pelayanan Minilam.

Tabel 4.6 berikut ini adalah target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029

Tabel 4.6
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	positif	Angka	421	421	421	421	421	421	421	
3.	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	positif	Angka	33	33	33	33	33	33	33	
4.	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	positif	%	71	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	79	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	positif	%	82	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	positif	%	78	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	positif	%	98	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	positif	%	48	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	positif	%	105	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	positif	%	19	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	positif	%	34	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	positif	%	52	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberculosis	positif	%	107	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	positif	%	98	100	100	100	100	100	100	
16	Positivity rateHIVdari 8 kategori penduduk berisiko		%	0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

BAB V

PENUTUP

Kegiatan pembangunan kesehatan diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal sehingga meningkat pula Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perencanaan strategis merupakan elemen penting sebagai kerangka dasar pembangunan yang berkelanjutan dengan penekanan pada kegiatan-kegiatan yang memberi dampak langsung . Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2025-2029 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, berikut indikator kinerja sehingga menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Sikka selama kurun waktu tiga tahun mendatang. Renstra Dinas Kesehatan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan lebih operasional dan terperinci dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi para aparatur penyelenggara Dinas Kesehatan maupun Unit Pelaksana Teknis dibawah lingkup Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis. Renstra ini juga dapat menjadi acuan lintas sektor yang bergerak dibidang kesehatan maupun dunia usaha yang terkait sehingga tercipta sinergitas dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka. Dengan tersusunnya Renstra ini menunjukkan kesungguhan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik kepada masyarakat.